TATA KELOLA
SEKTOR PUBLIK

Tim Penulis :
Hesti Umiyati, Kasful Anwar, Ade Putra Ode Amane, Baren Sipayung, Wesley Liano Hutasoit, Khairul Rijal, Nur Rohim Yunus, Kadek Wiwin Dwi Wismayanti, Ardhana Januar Mahardhani, Christina Bagenda, Yetty Setiyaningsih, Putu Eka Purnamaningsih, Eko Sudarmanto.

TATA KELOLA SEKTOR PUBLIK

Tim Penulis :
Hesti Umiyati, Kasful Anwar, Ade Putra Ode Amane, Baren Sipayung, Wesley Liano Hutasoit, Khairul Rijal, Nur Rohim Yunus, Kadek Wiwin Dwi Wismayanti, Ardhana Januar Mahardhani, Christina Bagenda, Yetty Setiyaningsih, Putu Eka Purnamaningsih, Eko Sudarmanto.

Penerbit Widina

TATA KELOLA SEKTOR PUBLIK

Tim Penulis:
Hesti Umiyati, Kasful Anwar, Ade Putra Ode Amane, Baren Sipayung, Wesley Liano Hutasoit, Khairul Rijal, Nur Rohim Yunus, Kadek Wiwin Dwi Wismayanti, Ardhana Januar Mahardhani, Christina Bagenda, Yetty Setiyaningsih, Putu Eka Purnamaningsih, Eko Sudarmanto.

Desain Cover:
Helmaria Ulfa

Tata Letak:
Handarini Rohana

Editor:
Aas Masruroh

ISBN:
978-623-459-353-2

Cetakan Pertama:
Februari, 2023

Hak Cipta 2023, Pada Penulis

Hak Cipta Dilindungi Oleh Undang-Undang

Copyright © 2020
by Penerbit Widina Bhakti Persada Bandung
All Right Reserved

Dilarang keras menerjemahkan, memfotokopi, atau memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku ini tanpa izin tertulis dari Penerbit.

PENERBIT:
WIDINA BHAKTI PERSADA BANDUNG
(Grup CV. Widina Media Utama)
Komplek Puri Melia Asri Blok C3 No. 17 Desa Bojong Emas
Kec. Solokan Jeruk Kabupaten Bandung, Provinsi Jawa Barat

Anggota IKAPI No. 360/JBA/2020
Website: www.penerbitwidina.com
Instagram: @penerbitwidina
Telpon (022) 87355370

Kata Pengantar

Rasa syukur yang teramat dalam dan tiada kata lain yang patut kami ucapkan selain mengucap rasa syukur. Karena berkat rahmat dan karunia Tuhan Yang Maha Esa, buku yang berjudul "Tata Kelola Sektor Publik" telah selesai disusun dan berhasil diterbitkan, semoga buku ini dapat memberikan sumbangsih keilmuan dan penambah wawasan bagi siapa saja yang memiliki minat terhadap pembahasan tentang Tata Kelola Sektor Publik.

Akan tetapi pada akhirnya kami mengakui bahwa tulisan ini terdapat beberapa kekurangan dan jauh dari kata sempurna, sebagaimana pepatah menyebutkan "*tiada gading yang tidak retak*" dan sejatinya kesempurnaan hanyalah milik tuhan semata. Maka dari itu, kami dengan senang hati secara terbuka untuk menerima berbagai kritik dan saran dari para pembaca sekalian, hal tersebut tentu sangat diperlukan sebagai bagian dari upaya kami untuk terus melakukan perbaikan dan penyempurnaan karya selanjutnya di masa yang akan datang.

Terakhir, ucapan terima kasih kami sampaikan kepada seluruh pihak yang telah mendukung dan turut andil dalam seluruh rangkaian proses penyusunan dan penerbitan buku ini, sehingga buku ini bisa hadir di hadapan sidang pembaca. Semoga buku ini bermanfaat bagi semua pihak dan dapat memberikan kontribusi bagi pembangunan ilmu pengetahuan di Indonesia.

Februari, 2023

Penulis

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR ..... **iii**
DAFTAR ISI ..... **iv**
BAB 1 DASAR-DASAR TATA KELOLA SEKTOR PUBLIK **1**
A. Pendahuluan 2
B. Pengertian Tata Kelola Sektor Publik 4
C. Terbentuknya Tata Kelola Sektor Publik 5
D. Manajemen Sumber Daya Manusia Sektor Publik 8
E. Kelembagaan Sektor Publik 13
F. Pengembangan Tata Kelola Sektor Publik dan Koordinasi 15
G. Rangkuman Materi 17
BAB 2 PRINSIP DAN PENERAPAN TATA KELOLA SEKTOR PUBLIK **23**
A. Pendahuluan 24
B. Pengertian Tata Kelola Sektor Publik 26
C. Penerapan Tata Kelola Sektor Publik 29
D. Penerapan Pada Sektor Publik dan Sektor Komersial 30
E. Penerapan Kelembagaan, Organisasi, dan Koordinasi 32
F. Prinsip Dasar Penerapan Tata Kelola Sector Publik 33
G. Rangkuman Materi 36
BAB 3 KARAKTERISTIK ENTITAS PUBLIK DAN TATA KELOLA SEKTOR PUBLIK **41**
A. Pendahuluan 42
B. Dari Sentralisasi Ke Desentralisasi 43
C. Memahami Tata Kelola (Governance) 46
D. Membangun Kepercayaan Publik Terhadap Pemerintah 48
E. Kelembaman Birokrasi 57
F. Dinamika Provinsi Sulawesi Tengah (Indonesia Governance Index 2012) 58
G. Rangkuman Materi 61
BAB 4 HUBUNGAN PARA PIHAK TERIKAT KONTRAK **65**
A. Pendahuluan 66
B. Kontrak Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah 74

C. Studi Kasus Permasalahan Hukum Terkait Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah 82
D. Rangkuman Materi 86
BAB 5 PERILAKU DAN MOTIVASI SOSIAL 91
A. Pendahuluan 92
B. Perilaku 94
C. Motivasi Sosial 102
D. Rangkuman Materi 110
BAB 6 PERILAKU DAN MOTIVASI EKONOMI 115
A. Perilaku Ekonomi 116
B. Motivasi Ekonomi 121
C. Prinsip Ekonomi 125
D. Rangkuman Materi 128
BAB 7 MASALAH-MASALAH DAN SOLUSINYA PADA TATA KELOLA SEKTOR PUBLIK 131
A. Pendahuluan 132
B. Permasalahan-Permasalahan Dalam Tata Kelola Sektor Publik 136
C. Solusi Penyelesaian Permasalahan Tata Kelola Sektor Publik 141
D. Rangkuman Materi 144
BAB 8 TEORI-TEORI TATA KELOLA SEKTOR PUBLIK 149
A. Pendahuluan 150
B. Tata Kelola Sektor Publik 151
C. Teori-Teori Sektor Publik 153
D. Faktor Keberhasilan Diterapkannya Good Governance 161
E. Faktor Penghambat Diterapkannya Good Governance 163
F. Contoh Kasus Pelangaran Good Governance 165
G. Tindakan Manajemen Yang Tepat Menuju Good Governance 166
H. Rangkuman Materi 169
BAB 9 PERAN MEDIA MASSA PADA TATA KELOLA SEKTOR PUBLIK 173
A. Pendahuluan 174
B. Fungsi Media Massa 174
C. Media Massa dan Pemerintah 176
D. Media Massa Dalam Keterbukaan Informasi Publik 178

E. Media Dalam Bingkai Good Governance 179
F. Rangkuman Materi 180
BAB 10 HUKUM MEDIA MASSA PADA TATA KELOLA SEKTOR PUBLIK 185
A. Pendahuluan 186
B. Proses Penggunaan Media Sosial Pemerintah 188
C. Kebijakan dan Implementasi Pengelolaan Media Sosial Oleh Pemerintah 191
D. Tantangan dan Risiko Penggunaan Media Sosial Oleh Pemerintah 193
E. Penggunaan Media Sosial Pemerintah di Indonesia 196
F. Rangkuman Materi 198
BAB 11 SISTEM INFORMASI TATA KELOLA SEKTOR PUBLIK 205
A. Pendahuluan 206
B. Tujuan, Penggunaan, dan Pengguna Sistem Informasi Publik 207
C. Konten Informasi Sistem Informasi Publik 210
D. Rangkuman Materi 215
BAB 12 MEKANISME TATA KELOLA SEKTOR PUBLIK 219
A. Pendahuluan 220
B. Pengertian Mekanisme Tata Kelola Sektor Publik 221
C. Konsep Mekanisme Tata Kelola Sektor Publik dan New Public Management 223
D. Prinsip dan Peran Mekanisme Tata Kelola Sektor Publik 224
E. Implementasi, Implikasi dan Evaluasi Mekanisme Tata Kelola Sektor Publik 230
F. Rangkuman Materi 236
BAB 13 MANAJEMEN TATA KELOLA SEKTOR PUBLIK 241
A. Pendahuluan 242
B. Manajemen Sektor Publik 243
C. Tata Kelola Sektor Publik Modern 250
D. Kesimpulan 253
GLOSARIUM 255
PROFIL PENULIS 261

BAB 1

DASAR-DASAR TATA KELOLA SEKTOR PUBLIK

A. PENDAHULUAN

Tata kelola yang baik (*Good Governance*) harus dilakukan secara terstruktur dan sistematis agar bisa mempertanggungjawabkan seluruh kegiatan yang dilakukan serta meningkatkan daya saing. Dengan pengelolaan yang baik, punya arah dan tujuan yang jelas untuk dicapai, serta memiliki ukuran yang jelas. Hal ini dapat menekan masalah korupsi, kolusi, dan nepotisme yang berkontribusi terhadap kinerja dan efektivitas organisasi melalui pelayanan inovasi akan meningkatkan efektifitas, efisiensi dan kualitas organisasi pemerintah dalam menghadapi perkembangan dunia (Vries, Bekkers, dan Tummers, 2015). Tata kelola sektor publik mengubah model interaksi yang produktif antara pemerintah dan publik yang awalnya bersifat kaku menjadi lebih fleksibel dengan mengedepankan partisipasi dan transparansi dalam tata kelola praktik global sektor publik.

Pengawasan dan evaluasi pengelolaan sektor publik sebaiknya dilakukan dengan menggunakan mekanisme yang inovatif sehingga dapat meningkatkan transparansi dan kredibilitas pengelolaan sektor publik yang penting dalam perencanaan investasi (*Organization for Economic Co-operation and Development*/OECD, 2011). Tata kelola sektor publik yang baik membantu membangun kepercayaan serta memberikan kepastian dan stabilitas yang dibutuhkan untuk perencanaan investasi jangka menengah dan jangka panjang. Dengan memaksimalkan sumber daya

DAFTAR PUSTAKA

Alberti, A., dan Bertucci, G. (2007). Innovation in governance and public administration: Key issues and perspectives. Dalam Department of Economic and Social Affairs (Ed.). Innovations in governance in the Middle East, North Africa, and Western Balkans: Making governments work better in the mediterranean region (h.3-12). New York: United Nations.

Ansell, Chris and Alison Gash (2008), 'Collaborative governance in theory and practice', *Journal of Public Administration Research and Theory*, 18 (4), 543–571.

Armstrong, Michael. 2009. Armstrong's Handbook of Human Resource Management Practice 11th edition. United Kingdom. Kogan Page.

Barros, Ana Christina Hirata; Denise Brettschneider; dan B. Ballaj. (2016). "Governance Global Practice,"http://siteresources.worldbank.org/ EXTCENFINREPREF/Resources/CVMENA_MAG.pdf.

Bernadin, John H. dan Joyce E.A. Russel. 1993. Human Resource Management. Singapore. Mc. Graw-Hill, Inc.

Damanpour, F. 1991. Organizational innovation: a meta-analysis of effects of determinants and moderators. The Academy of Management Journal, 34(3), 555-590. Diperoleh tanggal 11 Juli 2017, dari http://www.jstor.org/stable/256406.

Davies, Althea L. and Rehema M. White (2012), 'Collaboration in natural resource governance: Reconciling stakeholder expectations in deer management in Scotland', *Journal of Environmental Management*, 112, 160–169.

Ernan, et al. 2009. Perencanaan dan Pengembangan Wilayah. Yayasan Obor Indonesia.

IMF. (2018). "IMF and Good Governance," https://www.imf.org/en/About/ Factsheets/The-IMF-and-Good-Governance.

Kim, S., Kim, H. J., dan Lee, H. (2009). An institutional analysis of an e-government system for anticorruption: The Case of Open.

Government Information Quarterly, 26(1), 42-50. doi:10.1016/j.giq.2008.09.002.

KNKG. (2008). Pedoman Umum Good Public Governance Indonesia. Tt: Tp.

Lesmana Rian Andhika, 2017. Perbandingan Konsep Tata Kelola Pemerintah: Sound Governance, Dynamic Governance, dan Open Government Ilmu Administrasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Padjadjaran Jl. Bukit Dago Utara No. 25 Bandung 40135 e-mail: lesmana15001@mail.unpad.ac.id.

Mahmudi dan Mardiasmo, 2004. Local Government Performance Measurement in the era of Local Autonomy: The case of Sleman Regency Yogyakarta. SOSIOSAINS. 17 (1). Hal 117-133

Malan, R.M., Fountain Jr. J.R., Arrowsmith, D.S., & Lockridge II, R.L.,1984, Performance Auditing in Local Government, Government Finance OfficerAssociation, Chicago Illinois., http://gateway.brint.com

Mardiasmo, 2004, Akuntansi Sektor Publik, Edisi Kedua, Yogyakarta : Penerbit Andi

Nawawi, H. Hadari. 2000. Manajemen Sumber Daya Manusia Cetakan ketiga. Yogyakarta. Gama Press.

Neo, B. S., dan Chen, G. (2007). Dynamic governance: Embedding culture, capabilities and change in Singapore. Singapore: World Scientific Publishing.

OECD. (2011). “Policy Framework for Investment: User’s Toolkit,” http://www.oecd.org/investment/pfitoolkit.

Osborne, David and Ted Gaebler. 1992. Reinventing Government: How the enterpeneurial Spirit is Transforming the Public Sector. Addison-Wesley Publishing Company. Inc. http://gateway.brint.com

Vries, H. d., Bekkers, V., dan Tummers, L. 2015. Innovation in the public sector: A systematics review and future research agenda. Public Administration, 94(1), 146-166. doi:10.1111/ padm.12209.

Wahyudi, 2010. “Pemberdayaan Peran Audit Internal dalam Mewujudkan Good Governance pada Sektor Publik, www://pusdiklatwas.bpkp.go.id.

Wirtz, B. W., Weyerer, J. C., dan Rosch, M. 2017. Citizen and open government: An empirical analysis of antecedents of open government data. International Journal of Public Administration, 00(0), 1-14. doi:10.1080/01900692.2016.12636 59.

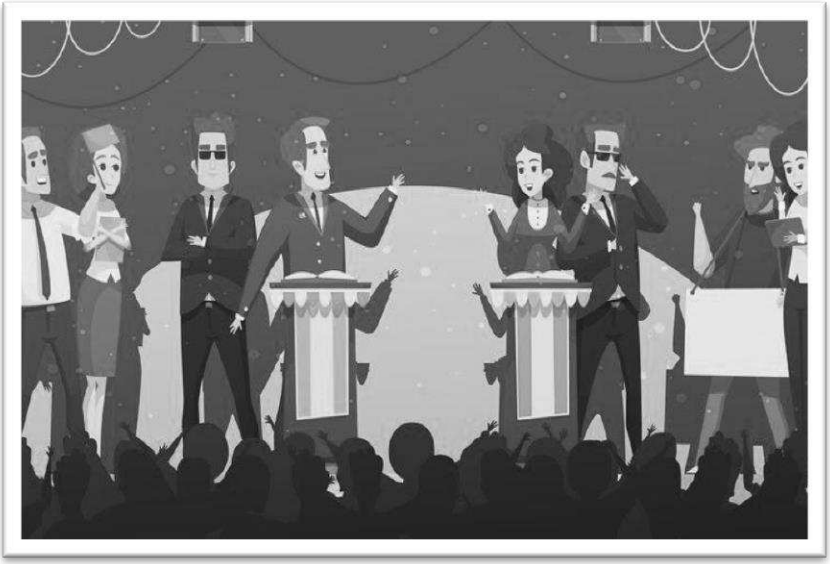

TATA KELOLA SEKTOR PUBLIK

BAB 2: PRINSIP DAN PENERAPAN TATA KELOLA SEKTOR PUBLIK

Dr. Kasful Anwar

Universitas Respati Indonesia Jakarta

BAB 2

PRINSIP DAN PENERAPAN TATA KELOLA SEKTOR PUBLIK

A. PENDAHULUAN

Prinsip dan penerapan tata kelola sektor publik dalam tata kepemerintahan yang baik seiring sejalan dengan semangat reformasi birokrasi yang tengah berlangsung. Beberapa lembaga merumuskan prinsip-prinsip yang digariskan dalam good governance dan menjadi nilai yang mendasarinya, seperti wawasan ke depan, keterbukaan dan transparansi, partisipasi masyarakat, tanggung gugat, supremasi hukum, demokrasi, profesionalisme dan kompetensi, daya tanggap, efisiensi dan efektivitas. Reformasi birokrasi merupakan upaya perubahan yang dilakukan secara sadar dan terencana agar birokrasi mampu menyesuaikan diri dengan dinamika lingkungan strategis dan mendorong perubahan yang lebih baik dalam penyelenggaraan pemerintahan. Hal ini sejalan dengan pendapat (Ansell, Chris dan Alison Gash, 2008), bahwa penerapan ilmu administrasi sangat penting dalam kolaborasi pengelolaan pemerintahan sektor publik.

Fenomena untuk menerapkan nilai-nilai tata kepemerintahan yang baik marak terjadi pada birokrasi pemerintahan baik di pusat maupun di daerah. Kondisi tersebut secara nyata telah membawa nilai-nilai positif bagi terselenggaranya birokrasi yang ditunjukkan dengan perubahan budaya dan peningkatan kinerja birokrasi. Dalam menerapkan nilai-nilai yang ada dalam tata kepemerintahan yang baik, setiap instansi memilih dan mengembangkan konsepnya tersendiri. Demikian juga, memberikan

DAFTAR PUSTAKA

Ansell, Chris dan Alison Gash. 2008. 'Collaborative governance in theory and practice', *Journal of Public Administration Research and Theory*, 18 (4), 543–571.

Bidwell, Ryan D. and Clare M. Ryan (2006), 'Collaborative partnership design: The implications of organizational affiliation for watershed partnerships', *Society and Natural Resources*, 19 (9), 827–843.

Bussu, S. and K.P.R. Bartels. 2011. 'Facilitative leaders in collaborative governance: Windows of opportunity and window dressing in Italy', PSA Annual Conference, London, 19–21 April.

Cheema, G. Shabir. 2005. Building Democratic Institutions: Governance Reform in Developing Countries. USA: Kumarian Press Inc.

Collier, David and Steven Levitisky. 1997. Democracy with Adjectives: Conceptual Innovation in Comparative Research in World Politics Journal, Vol. 49, No. 3.

Davies, Althea L. and Rehema M. White. 2012. 'Collaboration in natural resource governance: Reconciling stakeholder expectations in deer management in Scotland', *Journal of Environmental Management*, 112, 160–169.

Emerson, Kirk, Tina Nabatchi and Stephen Balogh. 2012. 'An integrative framework for collaborative governance', *Journal of Public Administration Research and Theory*, 22 (1), 1–29.

Farazmand, Ali. 2004. Sound Governance, Policy and Administrative Innovation. USA: Praeger Publishers.

Gerlak, Andrea K. and Tanya Heikkila. 2006. 'Comparing collaborative mechanisms in large-scale ecosystem governance', *Natural Resources Journal*, 46, 657–707.

Halim, A. 2007. *Akuntansi Sektor Publik: Akuntansi Keuangan Daerah*. Edisi Pertama. Jakarta : Selemba Empat.

Hicks, Darrin, Carl Larson, Christopher Nelson, David L. Olds and Erik Johnston. 2008. 'The influence of collaboration on program outcomes: The Colorado Nurse–Family Partnership', *Evaluation Review*, 32, 453–477.

Jonhstoon, Michael. 2003. Good Governance: Rule of Law, Transparency, and Accountability. UNDP.

Mardiasmo. 2004. *Akuntansi Sektor Publik*, Edisi Kedua, Yogyakarta : Penerbit Andi.

Mitchell, Shannon M. and Stephen M. Shortell. 2000. 'The governance and management of effective community health partnerships: A typology for research, policy, and practice', *Milbank Quarterly*, 78 (2), 241–289.

Page, Stephen. 2010. 'Integrative leadership for collaborative governance: Civic engagement in Seattle', *Leadership Quarterly*, 21 (2), 246–263.

Soepomo Projojono. 2000. *Definisi Akuntan sektor Publik Dalam Upaya Penciptaan GoodGovernment Governance***,** Kongres Nasional Akuntansi IV, Jakarta, Ikatan Akuntan Indonesia.

Taylor, Brent and Rob C. de Loë. 2012. 'Conceptualizations of local knowledge in collaborative environmental governance', *Geoforum*, 43 (6), 1207–1217.

Tjokroamidjojo, Bintoro. 2000. *Good Governance (Paradigma Baru Manajemen Pembangunan)*. Jakarta : UI Press.

Wdjaja Gunawan dan Wulandari Risnamanitis. 2007. *Go Public dan Go Private Di Indonesia.* Jakarta: Kencana Prenada Media Group.

Zarkasyi Moh. Wahyudin, 2008 *Good Corporate Governance Pada Badan Usaha Manufaktur, Perbankan, dan Jasa Keuangan Lainnya.* Jakarta: ALFABETA,cv.

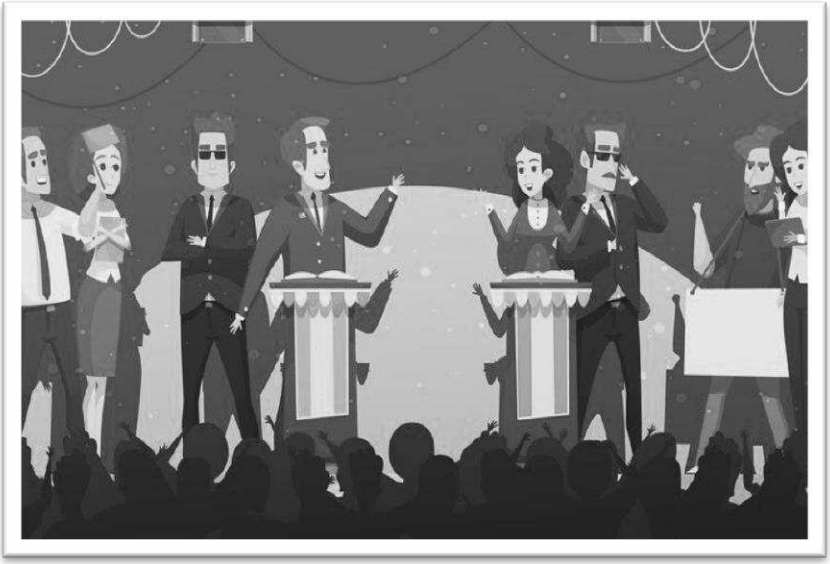

TATA KELOLA SEKTOR PUBLIK

BAB 3: KARAKTERISTIK ENTITAS PUBLIK DAN TATA KELOLA SEKTOR PUBLIK

Ade Putra Ode Amane, S.Sos., M.Si

Universitas Muhammadiyah Luwuk

BAB 3

KARAKTERISTIK ENTITAS PUBLIK DAN TATA KELOLA SEKTOR PUBLIK

A. PENDAHULUAN

Kata "publik" dalam konsep organisasi sektor publik memiliki banyak makna. Menurut pendapat Frederickson dalam (Rodiyah & Agustina, 2020) terdapat lima sudut pandang dari makna publik yaitu sudut pandang pluralis, pilihan publik, keterwakilan legislatif, penyelenggaraan pelayanan, dan kewarganegaraan.

Berdasarkan pendapat tersebut dapat dijabarkan masing-masing fokus sudut pandang tersebut yaitu: pertama, sudut pandang pluralis menyatakan bahwa publik merupakan kelompok kepentingan. Kedua, pendekatan pilihan publik menilai bahwa publik adalah sesuai pilihan yang rasional. Ketiga, sudut pandang legislatif menyatakan bahwa publik merupakan keterwakilan. Keempat, sudut pandang penyelenggaraan pelayanan memaknai publik adalah pelanggaran dari sebuah pelayanan dan sudut pandang yang terakhir dari sisi kewarganegaraan, maka publik dipahami sebagai warga negara.

Kelima sudut pandang di atas tidak terlepas dari konteks organisasi sektor publik. Organisasi publik tidak terlepas dari kepentingan masyarakat, sehingga organisasi sektor publik sering bergesekan dengan masalah yang berkaitan dengan masyarakat. Sehingga dalam menyelesaikan beberapa masalah diperlukan untuk mempertimbangkan pilihan-pilihan yang rasional. Sedangkan dalam mencapai keadilan di

DAFTAR PUSTAKA

Agus Hendrayady, Arman, Satmoko, N. D., Afriansyah, Heriyanto, Sholeh, C., Kusnadi, I. H., Tamrin, Mustanir, A., Ramdani, A., Amane, A. P. O., & Rahmat, M. R. (2022). *PENGANTAR ILMU ADMINISTRASI PUBLIK* (Pertama). EUREKA MEDIA AKSARA.

Daraba, D. (2019). *REFORMASI BIROKRASI & PELAYANAN PUBLIK*. Leisyah.

Muniruddin, S., Indrizal, E., Iswanto, Nurhamlin, Ansori, M., & Purwo, B. G. (2013). *"Tantangan Tata Kelola Pemerintahan di 33 Provinsi" Kompilasi Laporan 33 Provinsi Indonesia Governance Index 2012* (A. M. Gismar, I. Loekman, L. Hidayat, H. Sulistio, R. N. A. Muhammad, M. Chozin, & F. A. Nuril (eds.); Pertama). The Partnership for Governance Reform.

Purnomo, E. P., Nurmandi, A., Sulaksono, T., Hidayati, M., Ramdani, R., & Agustiyara. (2016). *Ekologi Pemerintahan* (pertama). LP3M UMY.

Putera, P. B., Mulatsih, S., Triyono, B., Oktaviyanti, D., Indraprahasta, G. S., & Gustina, A. (2014). *Tata Kelola Sistem Inovasi Nasional* (K. Tambunan & S. P. Dewi (eds.); pertama). LIPI Press.

Rodiyah, I., & Agustina, I. F. (2020). *BUKU AJAR MANAJEMEN SUMBER DAYA MANUSIA SEKTOR PUBLIK (MSDM-SP)* (D. Hariyanto & T. W. Abadi (eds.); Pertama). UMSIDA Press.

Silalahi, U., & Syafri, W. (2015). *DESENTRALISASI DAN PELAYANAN PUBLIK DEMOKRASI Menuju Pelayanan Pemerintah Daerah Lebih Transparan, Partisipatif, Responsif dan Akuntabel* (Pertama). IPDN PRESS.

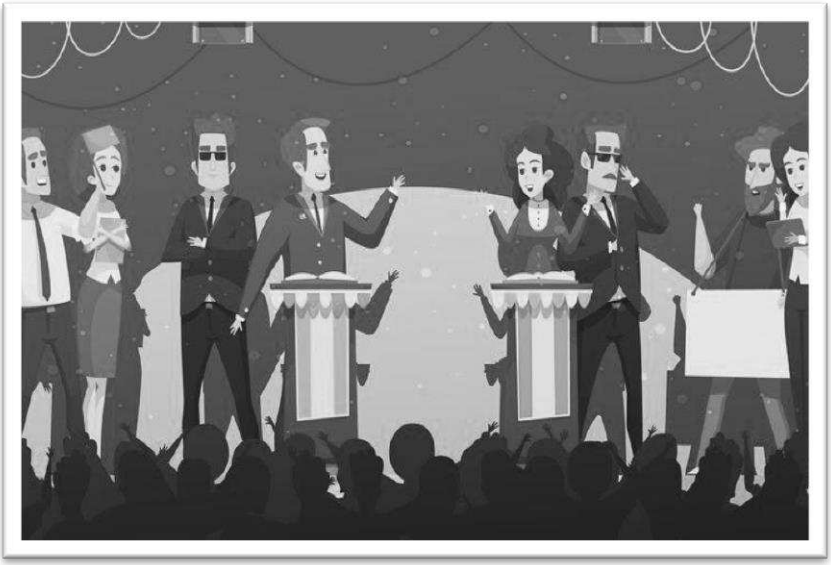

TATA KELOLA SEKTOR PUBLIK

BAB 4: HUBUNGAN PARA PIHAK TERIKAT KONTRAK

Baren Sipayung, S.H., M.A.P., C.L.A., CRMP

Universitas Mulawarman

BAB 4

HUBUNGAN PARA PIHAK TERIKAT KONTRAK

A. PENDAHULUAN

Kontrak dalam konteks bahasan kali ini adalah berhubungan dengan ilmu hukum, yaitu perjanjian atau istilah lainnya *contract* (Inggris) dan *overeenkomst*. Dapatlah ditelusuri secara leksikal dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), kontrak merupakan perjanjian (secara tertulis) antara dua pihak dalam perdagangan, sewa-menyewa, dan sebagainya; ataupun persetujuan yang bersanksi hukum antara dua pihak atau lebih untuk melakukan atau tidak melakukan kegiatan. Kemudian, menurut Wikipedia, kontrak atau perjanjian adalah kesepakatan antara dua orang atau lebih mengenai hal tertentu yang disetujui oleh mereka. Kontrak (Simanjuntak, 2011) merupakan bagian dari pengertian kontrak, yang mempunyai akibat hukum yang mengikat para pihak dan pelaksanaannya berkaitan dengan hak milik masing-masing pihak yang terikat oleh perjanjian itu.

Perjanjian juga dapat adalah "suatu peristiwa dimana seseorang berjanji kepada seorang lain atau dimana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal". Lebih lanjut, hubungan antar pihak di dalam suatu perjanjian tersebut dinamakan dengan perikatan. Selanjutnya, perikatan adalah suatu hubungan hukum secara timbal balik antara dua orang atau pihak, berdasarkan yang mana pihak yang satu berhak menuntut sesuatu hal dari pihak yang lain, dan pihak yang lain berkewajiban untuk memenuhi tuntutan itu. Hubungan hukum tersebut di dalam ilmu hukum dinamakan dengan prestasi yang berisi hak dan kewajiban, baik itu menyerahkan sesuatu, berbuat sesuatu (contoh, perjanjian kerja, pemborongan, atau jasa), dan tidak berbuat sesuatu (contoh, adanya gugatan perbuatan melawan hukum). Adapun ketentuan

DAFTAR PUSTAKA

Abdillah Zaini, (2021) *Syarat Sah Kontrak Pengadaan Barang atau Jasa Pemerintah, makalah, https://menulis.vendor-indonesia.id/2021/03/01/syarat-sah-kontrak-pengadaan-barang-jasa-pemerintah/*

Agri Chairunisa Isradjuningtias, "Force Majeure (Overmatch) Dalam Hukum Kontrak (Perjanjian) Indonesia," 137.

Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) *Kamus versi online/daring (dalam jaringan)* https://kbbi.web.id/kontrak

Bayu Seto Hardjowahono, (2013) "Naskah Akademik Rancangan Undang-undang Hukum Kontrak," Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum Dan HAM RI

Erie Hariyanto, (2009)"*Burgelijk Wetboek* (Menelusuri Sejarah Hukum Pemberlakuaanya Di Indonesia)," Jurnal Al-ihkam, Vol.4, No.1,

Munir, S. (2020). Fungsi Ekonomis dan Yuridis Kontrak dalam Perspektif Hukum Bisnis. Asy-Syari'ah: Jurnal Hukum Islam, 6(1), 81-97.

Huda, N., & Sadeli, D. (2018). Pengaruh Kompetensi, Sistem Pengendalian Internal, Sertifikasi Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah untuk Pencegahan Kecurangan (Fraud) pada Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. *Jurnal Citra Widya Edukasi*, *10*(3), 243-252.

K Tarmo Agus & Rismayanti Fadilla, (2017) Pengertian Dan Fungsi Kontrak, Makalah, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ponorogo.

Kementerian Dalam Negeri. (2020). Peraturan Kementerian Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah.

Kementerian PUPR. (2022, December 29). *Berita Terbaru*. SIPJAKI. Retrieved January 28, 2023, from https://sipjaki.pu.go.id/news/r/1309/bimbingan-teknis-teknik-penyusunan-kontrak-dalam-pengadaan-barang-jasa-pemerintah

Lembaga Kajian Nasional. (2018, September 5). *Diklat / Bimtek Teknik Penyusunan Kontrak dalam Pengadaan Barang/Jasa pemerintah*. Retrieved January 28, 2023, from https://lkn.or.id/diklat-bimtek-

teknik-penyusunan-kontrak-dalam-pengadaan-barang-jasa-pemerintah/

Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. (n.d.). *Konsolidasi Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 dan Perubahannya tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah*. Layanan Sertifikasi & Advokasi LKPP. Retrieved January 28, 2023, from https://sertifikasipbj.lkpp.go.id/perpres

Muhammad Muhtarom, (2014)"Asas-asas Hukum Perjanjian: Suatu Landasan Dalam Pembentukan Kontrak," Jurnal Suhuf, Vol.26, No.1,

Natasya Yunita Sugiastuti, (2015) "Esensi Kontrak Sebagai Hukum Vs Budaya Masyarakat Indonesia Yang Non Law Minded Dan Berbasis Oral Tradition," Jurnal Hukum PRIORIS, Vol. 5, No.1,

Oktavira, B. A. (2022, July 11). *Ini 4 Syarat Sah Perjanjian Dan Akibatnya Jika Tak Dipenuhi*. hukumonline.com. Retrieved January 25, 2023, from https://www.hukumonline.com/klinik/a/4-syarat-sah-perjanjian-dan-akibatnya-jika-tak-dipenuhi-cl4141

Ramli, S. (2014). *Bacaan Wajib Sertifikasi Ahli Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah*. VisiMedia.

Republik Indonesia. (2018). Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

Ridwan Khairandy, (2013), *Hukum Kontrak Indonesia Dalam Perspektif Perbandingan,* (Yogyakarta: FH UII Press,

Salim H.S, (2003), *Perkembangan Hukum Kontrak Innominaat Di Indonesia,* (Jakarta: Sinar Grafika,

Siahaya, Willem. 2012. Manajemen Pengadaan Procurement Management. Bandung: Alfabeta.
Christopher & Schooner (2007)

Simanjuntak, R. (2011). Hukum Kontrak Teknik Perancangan Kontrak Bisnis. Jakarta: Kontan Pub.

Sipayung, B., & Cristian, R. D. (2022). The Influence of The Implementation of Regional Autonomy on Regional Financial Management of East

Kalimantan Province. *Citizen: Jurnal Ilmiah Multidisiplin Indonesia*, *2*(3), 356-368.

Sipayung, B., & Wahyudi, A. (2022). Penerapan Good Governance dalam Rangka Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik yang Berintegritas di Lingkungan Badan Pemeriksa Keuangan. *Jurnal Pendidikan Tambusai*, *6*(2), 14323-14334.

Sumardana Putra Agus I Putu, (2020) Pengertian Kontrak, Advokat Bali

Topan Rendra, Jenis Kontrak dalam Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah, https://rendratopan.com/2019/11/18/jenis-kontrak-dalam-pengadaan-barang-dan-jasa-pemerintah/

Wikipedia.org. (2021, September 13). *Kontrak*. Retrieved January 28, 2023, from https://id.wikipedia.org/wiki/Kontrak

Yuliana Ema (2022) Mengenal Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah, https://kalbar.bnn.go.id/mengenal-pengadaan-barang-jasa-pemerintah/

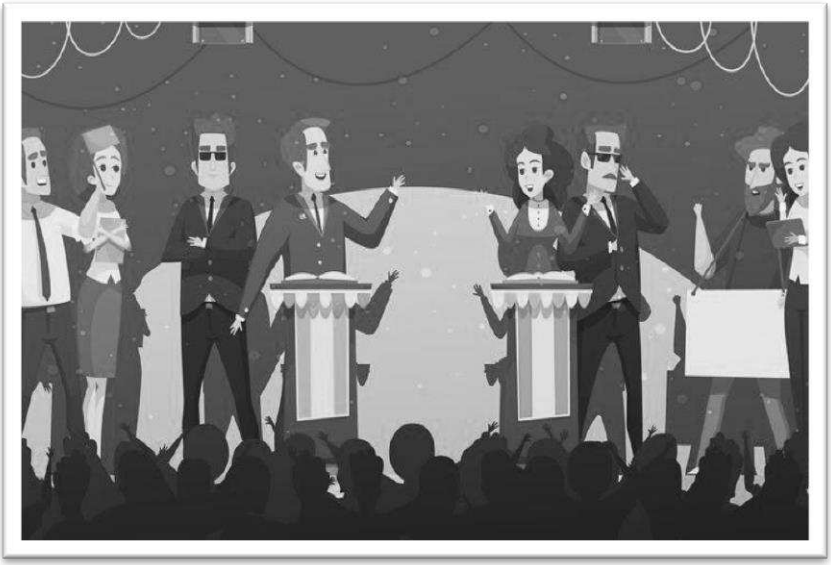

TATA KELOLA SEKTOR PUBLIK

BAB 5: PERILAKU DAN MOTIVASI SOSIAL

Wesley Liano Hutasoit S.Sos., M.SP

Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda

BAB 5

PERILAKU DAN MOTIVASI SOSIAL

A. PENDAHULUAN

Perilaku dan motivasi sosial dalam tata kelola sektor publik sebagai bagian menentukan governance sektor publik. Tata kelola mempengaruhi bagaimana tujuan organisasi ditetapkan dan dicapai, bagaimana risiko dipantau dan ditangani, dan bagaimana kinerja dioptimalkan. Jika melihat dari perkembangan pelayanan publik, maka tata kelola digitalisasi adalah bentuk pelayanan termutakhir saat ini dalam era teknologi. Perkembangan dan perubahan tata kelola sektor publik sudah mengalami perubahan sedemikian rupa yang tidak dapat terpisahkan dalam administrasi publik. Perkembangan administrasi publik dari manual, hybrid dan digitalisasi governance, kesemuanya tidak bisa lepas dari perilaku dan motivasi sosial yang mendasarinya. Perilaku dalam tata kelola sektor publik sangat menentukan kualitas dari pelayanan publik itu sendiri. Upaya untuk menata dan memperbaiki etika dan perilaku aparatur (baca: birokrat) di lingkungan birokrasi pemerintahan, sesungguhnya telah dilakukan baik terkait dengan penataan regulasi (peraturan) maupun pembentukan kelembagaan yang menangani masalah kode etik aparatur pemerintah (Satibi I, 2020, p, 235). Perilaku aparatur tidak boleh memperlihatkan performance yang tidak sejalan dengan keinginan dan kehendak masyarakat, perilaku aparatur ini justru lebih sering melukai perasaan dan hati nurani masyarakat. Aspek-aspek perilaku yang baik seperti akuntabel, responsif, transparan, bebas KKN, netral, tidak diskriminatif, sopan, dan nilai-nilai lainnya. Nilai ini yang akan menjadi pedoman bagi pejabat pemerintah (birokrat) dalam menjalankan tugas,

DAFTAR PUSTAKA

Achmad Nurmandi. (2005). Perilaku Birokrasi Publik Di Indonesia: Sebuah Kajian Teoritis.Jurnal Sosiohumaniora, Vol. 7, No. 2, Juli 2005 : 143 - 157

David Obsorn And Ted Gabler, 1992, Reiventing Government: How The Enterpreneurrial Spirit Is Transforming Thepublic Sektor, Addison-Wesley Publishing Co. Inc. Massachusette, Usa

Eko Susilo. 2016. Vol 5, No 1. Gaya Kepemimpinan Dan Motivasi Kerja Dalam Meningkatkan Pelayanan Publik. Doi: Https://Doi.Org/10.33366/Jisip.V5i1.212

Dea Valenska Gusman. (2021). Pengaruh Budaya Dan Lingkungan Dalam Menentukan Keberhasilan Implementasi Sistem. Vol 10, No 2 . Doi: Https://Doi.Org/10.32520/Stmsi.V10i2.1150

Muhammad Deni. 2018. Kedisiplinan Dan Motivasi Terhadap Kinerja Pegawai Pelayanan Publik. Vol 16, No 1. Doi: Https://Doi.Org/10.29259/Jmbs.V16i1.6245

Mulyaningsih. (2018). Analisis Perilaku Birokrasi Terhadap Efektivitas Organisasi.Doi: Https://Doi.Org/10.15575/Jk.V1i2.8703

Nurbiah Tahir. 2016. Motivasi Kerja Pegawai Dalam Pelayanan Publik Di Sekretariat Pemerintah Daerah Kabupaten Takalar. Vol. 3 No. 2. Doi: Https://Doi.Org/10.26858/Ja.V3i2.2423

Oja, H. (2016). Penerapan Manajemen Strategi Dalam Mewujudkan Kinerja Organisasi Sektor Publik. Societas : Jurnal Ilmu Administrasi Dan Sosial, 5(1), 1-11. Https://Doi.Org/10.35724/Sjias.V5i01.5

Paulus Sugiyo Pranoto. 2014. Pengaruh Budaya Organisasi Dan Motivasi Kerja Terhadap Kinerja Karyawan.

Rillia Aisyah Haris. 2018. Vol 13 No 1. Motivasi Pelayanan Publik (Public Service Motivation) Dalam Peningkatan Kinerja Sektor Publik. Doi: Https://Doi.Org/10.24929/Fisip.V12i1.461

Riza Dwi Agni. (2022). Pengaruh Kepemimpinan Yang Melayani Terhadap Perilaku Inovasi Kerja Pegawai Pada Sektor Publik Dengan Aliran Di Tempat Kerja Sebagai Variabel Intervening. Doi: Http://Dx.Doi.Org/10.52353/Ama.V15i2.319

Sambung, Roby. "Dimensi Komitmen Organisasional: Dampaknya Terhadap Perilaku Kerja Pada Organisasi Sektor Publik." Jurnal Terapan Manajemen Dan Bisnis, Vol. 2, No. 1, 2016.

Satibi, I., & Ediyanto, E. (2020). Etika Dan Perilaku Birokrasi Dalam Mendukung Penguatan Good Governance. Academia Praja : Jurnal Ilmu Politik, Pemerintahan, Dan Administrasi Publik, 3(02), 234-250. Https://Doi.Org/Https://Doi.Org/10.36859

Triono. 2021. Vol 5, No 4. Motivasi Kerja Pegawai Dalam Pelayanan Publik. Doi: Http://Dx.Doi.Org/10.36312/Jisip.V5i4.2583

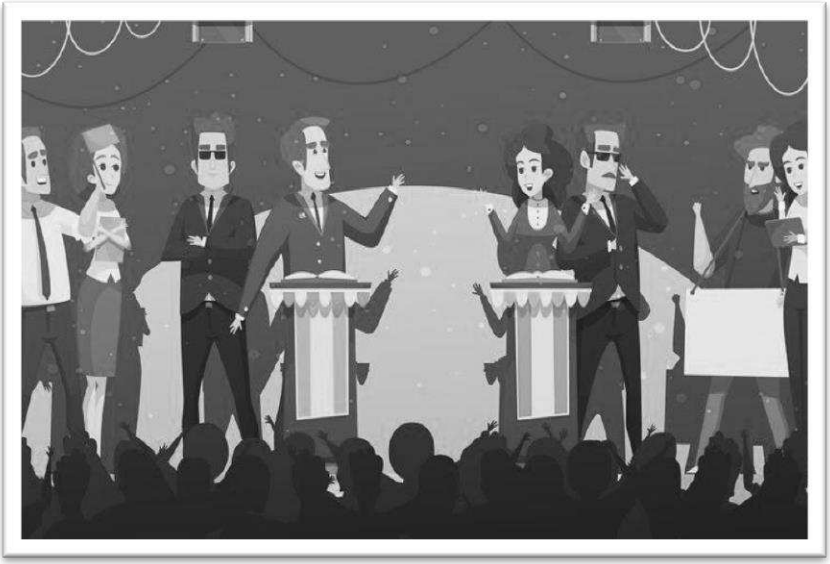

TATA KELOLA SEKTOR PUBLIK

BAB 6: PERILAKU DAN MOTIVASI EKONOMI

Dr (c) Khairul Rijal, S.E., M.Ag

STEBIS Muara Enim

BAB 6

PERILAKU DAN MOTIVASI EKONOMI

A. PERILAKU EKONOMI

Dalam tata kelola sektor publik terdapat pembahasan mengenai perilaku dan motivasi ekonomi yang menunjukkan suatu keadaan ekonomi pada semua aspek yang berhubungan dengan sektor publik. Perilaku Ekonomi pada umumnya menceritakan tentang kebutuhan manusia dimana terdapat sifat cenderung tidak terbatas sementara sumber daya yang dimilikinya terbatas. Walaupun demikian dengan keterbatasan itu dapat diatasi oleh manusia melakukan perilaku ekonomi. Perilaku ekonomi selalu menerangkan kehidupan manusia sehari-hari mulai dari hal paling kecil hingga hal yang paling besar.

Pengertian ekonomi pada umumnya ialah "suatu ilmu mengenai asas-asas produksi, distribusi dan pemakaian barang-barang serta kekayaan (seperti hal keuangan, perindustrian dan perdagangan)" Ekonomi juga dapat diartikan sebagai "suatu studi mengenai perilaku manusia dalam mengusahakan dan mengatur kegiatan konsumsi dan produksinya" (Paul A Samuelson dalam E. Ahman dan Y. Rohman, 2009). Dengan kata lain, ilmu ekonomi merupakan suatu studi tentang perilaku orang dan masyarakat dalam memilih, menggunakan sumber daya yang langka dan yang memiliki beberapa alternatif penggunaan untuk dapat memproduksi berbagai komoditi kemudian menyalurkannya, baik saat ini maupun di masa depan pada berbagai individu dan kelompok yang ada dalam suatu masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

Alex Sobur, Psikologi Umum, (Bandung: Pustaka Setia, 2011)

Anwar Prabu Mangkunegara, Perilaku Konsumen (Bandung: PT Refika Aditama, 2012)

Nugroho J. Setiadi, Perilaku Konsumen, (Jakarta: PT. Kharisma Putra, 2013)

Philip Kotler & John Bowen, Pemasaran, Perhotelan dan Kepariwisataan (Jakarta: PT Prenhallindo, 2002)

Sumarin, Ekonomi Islam, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2013)

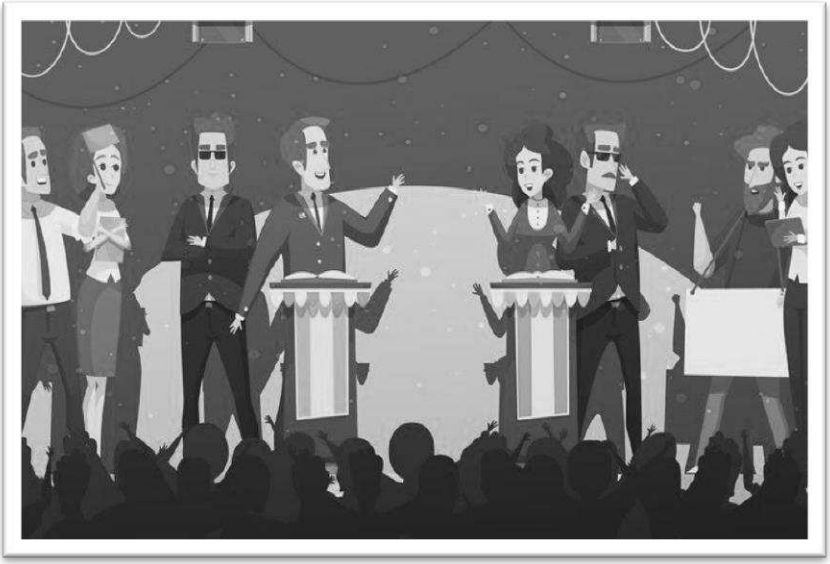

TATA KELOLA SEKTOR PUBLIK

BAB 7: MASALAH-MASALAH DAN SOLUSINYA PADA TATA KELOLA SEKTOR PUBLIK

Dr. Nur Rohim Yunus, S.H., LLM

UIN Syarif Hidayatullah Jakarta

BAB 7

MASALAH-MASALAH DAN SOLUSINYA PADA TATA KELOLA SEKTOR PUBLIK

A. PENDAHULUAN

Proses pembangunan yang sedang berlangsung di negara Indonesia saat ini tidak terlepas dari keberadaan sektor publik. Akibatnya, sektor publik telah menjadi titik fokus perencanaan pembangunan, khususnya di negara-negara berkembang, dan dianggap sebagai alternatif penting dalam proses mencari solusi untuk masalah ketenagakerjaan. Ekspansi populasi yang besar dapat secara langsung atau tidak langsung menimbulkan tantangan yang signifikan. Sebagian besar orang tidak secara otomatis memiliki kemampuan untuk langsung mendapatkan pekerjaan. Salah satu upaya pendekatan yang dapat dilakukan diantaranya adalah dengan membuka lahan pekerjaan sendiri dalam ekonomi tidak resmi.

Tantangan utama yang harus diatasi oleh sebagian besar negara berkembang, termasuk Indonesia, hingga saat ini adalah bagaimana memanfaatkan faktor manusia yang melimpah dan sebagian besar tidak terampil untuk pembangunan mereka. Hal ini diperlukan agar jumlah penduduk yang besar tidak menjadi beban pembangunan, melainkan menjadi sumber modal pembangunan. Oleh karena itu, fungsi sektor publik menjadi semakin penting, terutama karena mampu menyerap banyak orang dan tidak memerlukan keahlian yang tinggi. Padahal, sektor publik berpotensi menjadi wadah pengembangan sumber daya manusia.

DAFTAR PUSTAKA

Andhika, Lesmana Rian. 2020. Kajian Literatur: Studi Pemetaan Sistematis Indikator Inovasi Sektor Publik. Jurnal Litbang Sukowati Media Penelitian Dan Pengembangan 3(2):19. Doi: 10.32630/Sukowati.V3i2.150.

Bernardin, H. John; Russell, Joyce E. A. 2003. Human Resource Management: An Experiential Approach. Mcgraw-Hill, Business & Economics.

Chariri, Anis; Farikhoh, Ilmi. 2022. Korupsi Di Sektor Publik: Tinjauan Literatur Sistematis Dan Analisis Bibliometrik. Integritas 8(1):63-76. Doi: 10.32697/Integritas.V8i1.866

Hermanto. 2018. Pengentasan Kemiskinan Di Perdesaan: Pengembangan Sdm, Penguatan Usaha, Dan Inovasi Pertanian. Forum Penelitian Agro Ekonomi. 35(2):139. Doi: 10.21082/Fae.V35n2.2017.139-150

Iskandar, Dadi Junaedi. 2017. Pentingnya Partisipasi Dan Peranan Kelembagaan Politik Dalam Proses Pembuatan Kebijakan Publik. Jurnal Ilmu Administrasi Media Pengembangan Ilmu Dan Praktek Administrasi 14(1):17. Doi: 10.31113/Jia.V14i1.2

Kadir, Abdul. 2003. Pengenalan Sistem Informasi. Yogyakarta: Andi Offset.

Nurhidayati. 2006. Kunci Memenangkan Keunggulan Bersaing Yang Berkelanjutan Melalui Pengetahuan Tacit Dan Manajemen Pengetahuan. Ekobis, Vol. 7. No. 1. Januari 2006. 113-118

Nurlaily, Hasrina; Windari, Rusmilawati. 2022. Re-Formulasi Ketentuan Korupsi Sektor Swasta Komparatif Indonesia Dengan New Zealand. Jurnal Ius Constituendum 7(1):131. Doi: 10.26623/Jic.V7i1.3224

Prasetya, Antonius Galih. 2017. Mengintegrasikan Reformasi Birokrasi Dengan Inovasi Sektor Publik. Jurnal Analis Kebijakan. Vol 1 No 1. Doi: 10.37145/Jak.V1i1.23

Rahmawati, Widia Dwi; Fauzi, Agus Mahcfud. 2021. Perebutan Ruang Publik Pedagang Kaki Lima Pada Masa Pandemi Di Alun-Alun Jombang: Studi Kasus Pedagang Kaki Lima Di Alun-Alun Jombang. Jurnal Ilmiah Dinamika Sosial 5(1):17-32. Doi: 10.38043/Jids.V5i1.2971

Roswandi, Risvan Akhir. 2021. Menakar Keselarasan Islam Dan Patriotisme. Jurnal Pendidikan Dan Pemikiran. Vol. 16 No. 1. Doi: 10.55558/Alihda.V16i1.50

Sururi, Ahmad. 2019. Inovasi Kebijakan Organisasi Sektor Publik Menuju Terwujudnya Good Public Policy Governance. Vol 15, No 1. Doi: 10.32834/Gg.V15i1.96.

Tim Bappeda Kota Pangkalpinang. 2020. Pengukuran Kinerja Organisasi, Komitmen Organisasi, Dan Inovasi Kebijakan Terhadap Pelaksanaan Good Corporate Governance Kota Pangkalpinang. Indonesian Journal Of Accounting And Business. November 2020. Doi: 10.33019/Accounting.V2i1.19

Vandenabeele, Wouter; Bram Steijn; Emanuel Camilleri; Emanuel Camilleri; Adrian Ritz. 2008. Comparing Public Service Motivation Within Various Europe Countries: Do Institutional Environments Make A Difference?

Wasino. 2016. Nasionalisasi Perusahaan-Perusahaan Asing Menuju Ekonomi Berdikari. Paramita Historical Studies Journal 26(1):62. Doi: 10.15294/Paramita.V26i1.5146

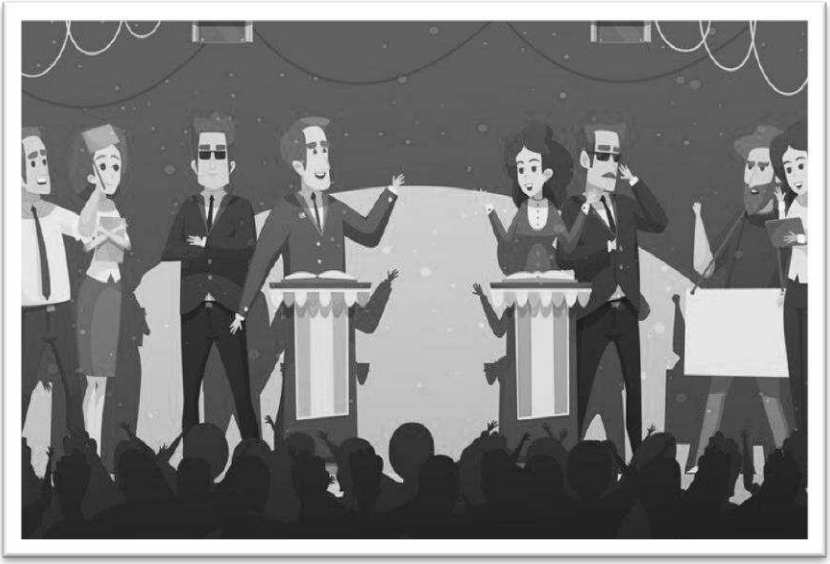

TATA KELOLA SEKTOR PUBLIK

BAB 8: TEORI-TEORI TATA KELOLA SEKTOR PUBLIK

Kadek Wiwin Dwi Wismayanti, S.E., MAP

Universitas Udayana

BAB 8

TEORI-TEORI TATA KELOLA SEKTOR PUBLIK

A. PENDAHULUAN

Indonesia pada era birokrasi tidak menunjukkan adanya pergerakan perkembangan menjadi lebih baik, hal itu disebabkan karena adanya para birokrat yang arogan dan menganggap para rakyatlah yang membutuhkan mereka. Praktek dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN) masih sangat sering terjadi, bahkan sifat dari para birokrat pun tidak menunjukkan sebagaimana ia harus bersikap, karena Sebagian besar mereka masih jauh dari standar karakter birokrat yang efisien dan juga efektif. Demi mewujudkan birokrasi yang efisien dan efektif, pemerintah pun mengesahkan peraturan tentang Grand Design Reformasi Birokrasi Indonesia 2010-2015 untuk menjadi landasan pelaksanaan birokrasi di Indonesia.

Sektor publik merupakan salah satu bagian dari perwujudan pemerintahan yang baik dalam memberikan suatu layanan kepada masyarakat. Pelayanan masyarakat pada seluruh sektor memiliki peran yang sangat penting. Sektor publik adalah sebuah manajemen pengelolaan pemerintah sehingga memiliki peran yang sangat besar terlebih lagi dalam menghadapi persoalan dalam suatu negara. Melalui hal itu, diperlukannya tata cara pengelolaan negara yang tepat demi memberikan layanan publik yang baik. Dengan begitu, diperlukan adanya pelaksanaan program pemerintah menggunakan konsep Good governance. Kepercayaan

DAFTAR PUSTAKA

Anti Corruption Clearing House. 2007. Tata Kelola Pemerintah Yang Baik.

Carolam. (2021, October 14). What Is *Good Governance*? - Creative Learning. Creative Learning. Http://Creativelearning.Org/Blog/2021/10/14/What-Is-Good-Governance/#:~:Text=Consensus%20oriented%20is%20demonstrated%20by,S Ocial%20context%20of%20the%20community.

Dr. Taufiqurokhman. 2014. Kebijakan Publik. Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Moestopo Beragama (Pers)

Ferry Prasetya, Se., M.App E. 2012. Teori Sektor Publik. Modul Ekonomi Publik: Universitas Brawijaya

Jefri, R. 2018. Teori Stewardship Dan *Good Governance*. Jurnal Riset Edisi Xxvi, Vol 4, No. 003 (2018)

Kismantoroadj, T. 2019.Teori Perubahan Social: Teori Sebab Akibat, Teori Fungsional.

Kisworo, J. & Shauki, E. R.(2019). Teori Institusional Dalam Penyusunan Dan Publikasi Laporan Tahunan Sektor Publik (Studi Kasus Pada Kementerian Dan Lembaga Negara Di Indonesia). Indonesian Treasury Review: Jurnal Perbendaharaan, Keuangan Negara Dan Kebijakan Publik, 4(4), 305-321.

Pengertian, Prinsip Dan Penerapan *Good Governance* Di Indonesia | Bagian Protokol Dankomunikasipimpinan.(2017).Bulelengkab.Go.Id.Https://Prokomsetda.Bulelengkab.Go.Id/Informasi/Detail/Artikel/Pengertian- Prinsip-Dan-Penerapan-Good-Governance-Di-Indonesia-99

Rossieta. A, Muktiyanto. A, Geraldina. I. 2020. Tata Kelola Sektor Publik. Tanggerang Selatan: Universitas Terbuka

Safrijal , M. Nasir Basyah, Hasbi Ali. 2016. Penerapan Prinsip-Prinsip Good Governance Oleh Aparatur Pelayanan Publik Di Kecamatan Kluet Utara Kabupaten Aceh Selatan. Jurnal Ilmiah Mahasiswa Pendidikan Kewarganegaraan Unsyiah Volume 1, Nomor 1: 176-191

Sayidah, Nur. 2018. Implementasi Konsep New Public Management Di Dinas Koperasi Dan Umkm Kota Surabaya. Jurnal Akuntansi Dan Auditing, Vol 12 No. 1.

Weny A. Dungga, Abdul Hamid Tome, Apriyanto Moha. 2017. Penerapan Prinsip Good Governance Dalam Tata Kelola Pemerintahan Desa Di Kecamatan Telaga Jaya Kabupaten Gorontalo. 2 Maksigama Jurnal Hukum, Volume 11 Nomor 1 Periode Mar 2017 Hal 1-10.

Wicaksono, A.W. 2018. Telaah Kritis Administrasi Dan Manajemen Sektor Publik Di Indonesia.

Tome, Abdul Hamid. 2012. Reformasi Birokrasi Dalam Rangka Mewujudkan Good Governance Ditinjau Dari Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 20 Tahun 2010. Tesis, Pasca Sarjana Universitas Sam Ratulangi, Manado.

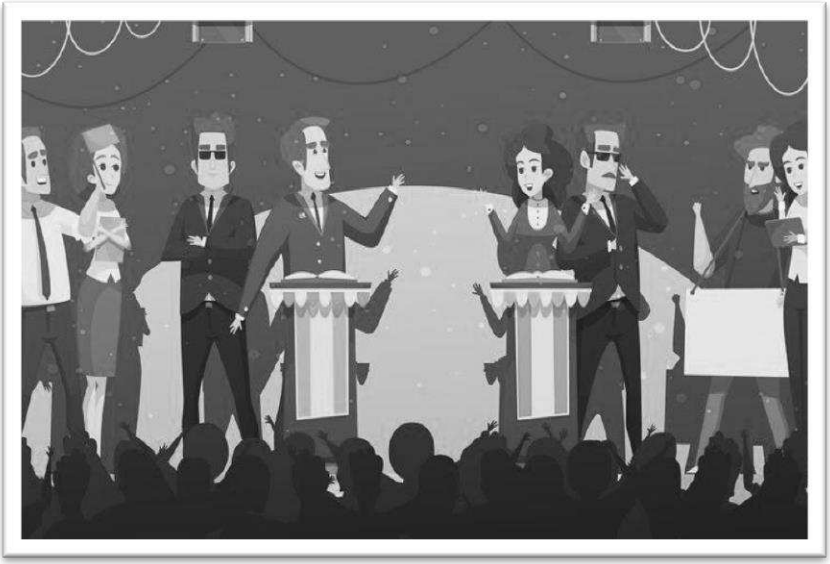

TATA KELOLA SEKTOR PUBLIK

BAB 9: PERAN MEDIA MASSA PADA TATA KELOLA SEKTOR PUBLIK

Dr. Ardhana Januar Mahardhani, M.KP.

Universitas Muhammadiyah Ponorogo

BAB 9

PERAN MEDIA MASSA PADA TATA KELOLA SEKTOR PUBLIK

A. PENDAHULUAN

Media massa sebagai wadah pers dan alat komunikasi massa memiliki peran penting dalam pelaksanaan keterbukaan informasi publik. Media massa dipandang sebagai cara untuk memahami tentang peristiwa yang berbeda dan terjadi setiap hari di dalam proses pemerintahan. Media juga dianggap sebagai cermin dari berbagai peristiwa di masyarakat dan dunia. Media dan pemerintah harus menyadari sinkronisasi antara Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP) dan Undang-Undang Kebebasan Pers. Untuk mengimplementasikan UU KIP, bagian humas dalam instansi pemerintah harus mampu menyajikan informasi kepada publik secara transparan dan mudah diakses. Oleh karenanya pemerintah harus tanggap bagaimana menggunakan cara yang cepat, akurat, murah dan mudah untuk menyebarkan informasi.

B. FUNGSI MEDIA MASSA

Media massa adalah sarana komunikasi massa dimana proses penyampaian pesan, gagasan, atau informasi kepada orang banyak (publik) secara serentak. Sebuah media dapat disebut sebagai media massa jika memiliki karakteristik: (1) bersifat melembaga, artinya pihak yang mengelola media terdiri dari banyak orang dan masing-masing mempunyai tugas yang berbeda, (2) bersifat satu arah, yaitu dalam prosesnya media massa ini sangat jarang adanya interaksi antara pembaca

DAFTAR PUSTAKA

Cangara, H. (2010). *Pengantar Ilmu Komunikasi*. Rajawali Pers.

Hasbi, I., Hartoto;, Maharani, D. D., & Mahardhani, A. J. (2021). *KEBIJAKAN PUBLIK*. Widina Bhakti Persada. https://repository.penerbitwidina.com/publications/345859/kebijakan-publik

Jahang, B. S. (2014). Peran Media Massa dalam Penerapan Good Governance. *Jurnal Kebijakan Publik*, *5*(3), 105–110. https://doi.org/10.31258/JKP.V5I3.2234

Nugroho, A. (2006, September 13). *Posisi Media Dalam Bingkai Good Governance*. https://news.detik.com/kolom/d-674311/posisi-media-dalam-bingkai-good-governance

Rahmanto, A. N. (2022). Media Sosial dan Persepsi Publik tentang Good Governance pada Pemerintah Daerah di Solo Raya. *Jurnal Ilmu Komunikasi*, *20*(1), 88–100. https://doi.org/10.31315/JIK.V20I1.6433

Susanto, E. H. (2013). Media Massa, Keterbukaan Informasi, dan Kekuasaan Negara. *Communication and Culture in Southeast Asian Region: Evolution, Development, Challenges*. https://www.researchgate.net/publication/301694359_Media_Massa_Keterbukaan_Informasi_dan_Kekuasaan_Negara

Yunidar, Z. A. (2018, January 15). *Peran Media Massa* . Https://Www.Obsessionnews.Com. https://www.obsessionnews.com/peran-media-massa/

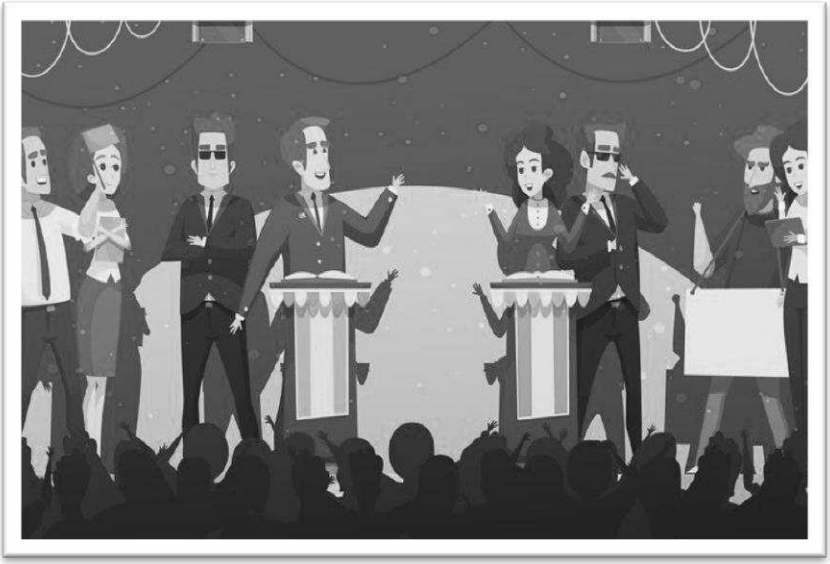

TATA KELOLA SEKTOR PUBLIK

BAB 10: HUKUM MEDIA MASSA PADA TATA KELOLA SEKTOR PUBLIK

Christina Bagenda, S.H., M.H., C.P.C.L.E

Fakultas Hukum Universitas Flores

BAB 10

HUKUM MEDIA MASSA PADA TATA KELOLA SEKTOR PUBLIK

A. PENDAHULUAN

Perkembangan dunia digital dalam satu dekade terakhir menghadirkan berbagai macam teknologi yang memudahkan orang-orang mengakses informasi. Masuknya internet ke dalam kehidupan manusia telah memungkinkan orang-orang membangun kehidupan sosialnya secara daring melalui pertumbuhan yang signifikan. Jumlah pengguna media sosial juga terus bertambah, dengan rata-rata 13 pengguna baru setiap detiknya.

Semakin banyaknya pengguna media sosial ini membuat instansi pemerintah juga mulai memanfaatkan keberadaan media sosial untuk terhubung dengan masyarakat yang dilayani. Bertot et al. (2010) melihat bahwa media sosial menawarkan kepada pemerintah potensi untuk meningkatkan partisipasi demokrasi dengan mendorong publik untuk memiliki suara dalam pembuatan kebijakan, bekerja dengan publik untuk meningkatkan layanan, mengumpulkan ide, dan meningkatkan transparansi. Pemerintah di berbagai tingkatan mencari sarana komunikasi yang lebih baik, lebih transparan, dan lebih bisa memfasilitasi partisipasi maupun kolaborasi dengan masyarakat dalam berbagai kegiatan pemerintah. Akibatnya, semakin banyak lembaga pemerintah yang mulai menggunakan media sosial sebagai bagian dari saluran interaksi mereka dengan memanfaatkan media sosial, pemerintah dapat memberi informasi kepada masyarakat dan mempromosikan layanan

DAFTAR PUSTAKA

Azeem, Mohammad Ribhul, and Ahmad Toni. 2018. "Strategi Humas Kementerian Koperasi Dan Usaha Kecil Dan Menengah Dalam Pengelolaan Jejaring Sosial." Jurnal Komunikasi 10 (2): 115–30.

Bertot, John Carlo, Paul T Jaeger, and Derek Hansen. 2012. "The Impact of Polices on Government Social Media Usage : Issues , Challenges , and Recommendations." Government Information Quarterly 29 (1): 30–40.

Criado, J. Ignacio, Rodrigo SandovalAlmazan, and J. Ramon Gil-Garcia. 2013. "Government Innovation through Social Media." Government Information Quarterly 30 (4): 319–26. https://doi.org/10.1016/j.giq.2013.10.0 03.

Chen, Qiang, Chen Min, Wei Zhang, Ge Wang, Xiaoyue Ma, and Richard Evans. 2020. "Unpacking the Black Box: How to Promote Citizen Engagement through Government Social Media during the COVID-19 Crisis." Computers in Human Behavior 110 (April): 106380. https://doi.org/10.1016/j.chb.2020.106 380.

Cahyani, Adelia Masrifah. 2020. "Strategi Komunikasi Humas Pemerintah Kota Surabaya Melalui Media Sosial." Jurnal Ilmu Komunikasi 10 (1): 1–16. https://doi.org/10.15642/jik.2020.10.1. 1-16

Chang, Ai-Mei, and P. K. Kannan. 2008. "Leveraging Web 2.0 in Government." http://www.businessofgovernment.org /sites/default/files/LeveragingWeb.pdf

DePaula, Nic, Ersin Dincelli, and Teresa M Harrison. 2018. "Toward a Typology of Government Social Media Communication: Democratic Goals, Symbolic Acts and Self-Presentation." Government Information Quarterly 35 (1): 98–108. https://doi.org/10.1016/j.giq.2017.10.0 03.

Dwivedi, Yogesh K., Nripendra P. Rana, Mina Tajvidi, Banita Lal, G. P. Sahu, and Ashish Gupta. 2017. "Exploring the Role of Social Media in EGovernment: An Analysis of Emerging Literature." ACM International Conference Proceeding Series Part F1280 (March): 97–106. https://doi.org/10.1145/3047273.3047 374.

DailySocial. 2018. “Hoax Distribution Through Digital Platforms in Indonesia 2018.” https://dailysocial.id/post/laporandailysocial-distribusi-hoax-di-mediasosial-2018.

Effendi, Muhammad Wahyu, Yan Hendra, and Armansyah Matondang. 2019. “Persepsi Masyarakat Tentang Citra Pemerintah Kota Medan Melalui Akun Media Sosial Instagram @humas_pemkomedan.” Perspektif 8 (1): 20–26. http://ojs.uma.ac.id/index.php/perspek tif.

Gazali, Effendi. 2014. “Learning by Clicking: An Experiment with Social Media Democracy in Indonesia.” International Communication Gazette 76 (4–5): 425–39. https://doi.org/10.1177/174804851452 4119.

Idris, Ika Karlina. 2018. “Government Social Media in Indonesia: Just Another Information Dissemination Tool.” Jurnal Komunikasi: Malaysian Journal of Communication 34 (4): 337–56. https://doi.org/10.17576/JKMJC2018-3404-20.

Izzati, Afifah Nurul, Azmi Pratama, IGAA Mas Aristamy, Nina Fadilah Najwa, and Nur Aini Rakhmawati. 2018. “KATEGORISASI JENIS INTERAKSI PEMERINTAH DAN MASYARAKAT SERTA POPULARITAS MEDIA SOSIAL PEMERINTAH DAERAH.” Jurnal Sistem Informasi (Journal of Information System) 14 (1): 68–70. https://doi.org/https://doi.org/10.2160 9/jsi.v14i1.567.

Juanda, Heri. 2017. “Media Sosial Sebagai Penyebarluasan Informasi Pemerintah Aceh.” Jurnal Peurawi 1 (1): 1–22.

Juditha, Christiany. 2015. “Political Marketing Dan Media Sosial.” Jurnal Studi Komunikasi Dan Media 19 (2): 225–42.

Khan, Gohar Feroz, Bobby Swar, and Sang Kon Lee. 2014. “Social Media Risks and Benefits: A Public Sector Perspective.” Social Science Computer Review 32 (5): 606–27. https://doi.org/10.1177/089443931452 4701.

Kartikawangi, Dorien. 2020. “Focus Group Based Evaluation of Social Media Usage in Indonesia’s Digital Government.” Asian Journal for Public Opinion Research 8 (1): 41–58. https://doi.org/10.15206/ajpor.2020.8. 1.41.

Kaplan, Andreas M., and Michael Haenlein. 2010. Users of the World, Unite! The Challenges and Opportunities of Social Media. Business Horizons. Vol. 53. https://doi.org/10.1016/j.bushor.2009. 09.003.

Kayes, Imrul, and Adriana Iamnitchi. 2017. "Privacy and Security in Online Social Networks: A Survey." Online Social Networks and Media 3–4: 1–21. https://doi.org/10.1016/j.osnem.2017. 09.001.

Kementerian Komunikasi dan Informatika. 2018. Memaksimalkan Penggunaan Media Sosial Dalam Lembaga Pemerintah. Direktorat Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik Kementerian Komunikasi dan Informatika. http://indonesiabaik.id/public/uploads/ post/2997/Memaksimalkan_Pengguna an_Media_Sosial_dalam_Lembaga_P emerintah.pdf.

Lee, Gwanhoo, and Young Hoon Kwak. 2012. "An Open Government Maturity Model for Social Media-Based Public Engagement." Government Information Quarterly 29 (4): 492– 503. https://doi.org/10.1016/j.giq.2012.06.0 01.

Nepal, Surya, Cecile Paris, and Dimitrios Georgeakopoulos. 2015. Social Media for Government Services. Social Media for Government Services. https://doi.org/10.1007/978-3-319- 27237-5.

PEDOMAN PEMANFAATAN MEDIA SOSIAL INSTANSI PEMERINTAH. Republik Indonesia. https://peraturan.bpk.go.id/Home/Dow nload/123632/PERMENPAN NOMOR 83 TAHUN 2012.pdf.

Revilia, Donna, and Nfn Irwansyah. 2020. "Social Media Literacy: Millenial's Perspective of Security and Privacy Awareness." Jurnal Penelitian Komunikasi Dan Opini Publik 24 (1): 1–15. https://doi.org/10.33299/jpkop.24.1.23 75

Suryadharma, Bertung, and Tony Dwi Susanto. 2017. "Faktor Penerimaan Media Sosial Instansi Pemerintah Di Indonesia." Integer: Journal of Information Technology 2 (2): 1–10. http://ejurnal.itats.ac.id/index.php/inte ger/article/view/174.

Saidah, Musfiah, and Effy Zalfiana Rusfian. 2020. "Hoax Management of Presidential Staff Office: An Example of Government Public Relations Strategies." Jurnal Studi Komunikasi (Indonesian Journal of Communications Studies) 4 (1): 32. https://doi.org/10.25139/jsk.v4i1.1769

Webber, Alan. 2012. “Guarding the Social Gates: The Imperative for Social Media Risk Management.” Altimeter Group.

Zavattaro, Staci M., and Lori A. Brainard. 2019. “Social Media as MicroEncounters: Millennial Preferences as Moderators of Digital Public Value Creation.” International Journal of Public Sector Management 32 (5): 534–52. https://doi.org/10.1108/IJPSM-02-2018-0059 Sobaci, Mehmet Zahid, and Naci Karkin. 2013. “

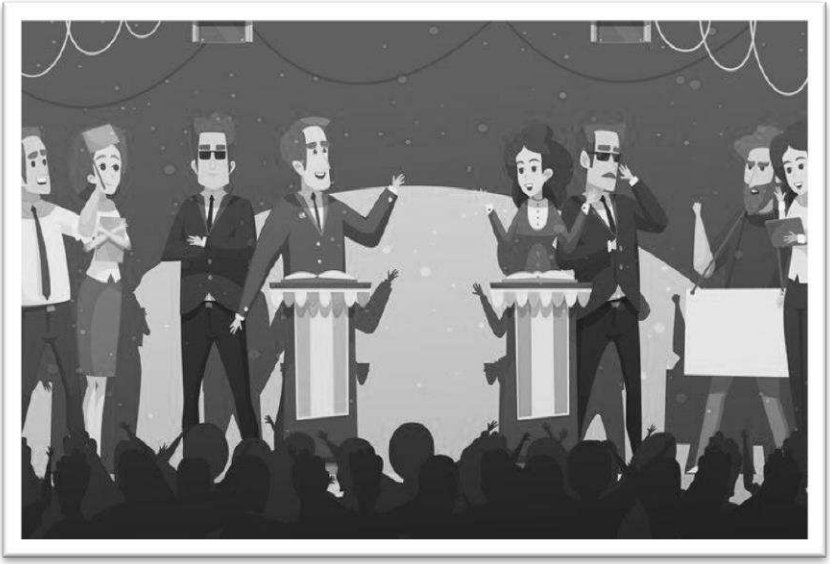

TATA KELOLA SEKTOR PUBLIK

BAB 11: SISTEM INFORMASI TATA KELOLA SEKTOR PUBLIK

Dr. Yetty Setiyaningsih SP, M.Eng, IALI

Kepala Bidang Pengelolaan Pertamanan dan Pemakaman Pemerintah Kota Magelang

BAB 11

SISTEM INFORMASI TATA KELOLA SEKTOR PUBLIK

A. PENDAHULUAN

Sistem informasi saat ini menjadi perhatian utama untuk peningkatan kualitas layanan yang kredibel dan transparan untuk mendorong setiap organisasi baik sektor swasta maupun sektor publik.

Menurut Laudon dan Laudon (2017), sistem informasi secara teknis adalah sekumpulan komponen yang saling berhubungan yang mengumpulkan, menyimpan, memproses, dan berbagi informasi untuk mendukung pengambilan keputusan dan pengendalian organisasi. Sistem informasi juga membantu manajer dan karyawan menganalisis masalah, menjelaskan masalah yang kompleks, dan menciptakan produk atau inovasi baru. Sistem informasi berisi informasi penting berupa orang, tempat dan hal-hal penting lainnya yang berkaitan dengan organisasi dan lingkungan di luar organisasi. Menurut definisi tersebut, sistem informasi secara umum adalah sekumpulan elemen atau komponen yang saling berhubungan dan berperan untuk mengumpulkan, menyimpan, mengolah dan bertukar informasi yang nantinya dapat digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan.

Informasi dapat diartikan sebagai data yang diolah menjadi bentuk yang dapat dipahami manusia yang memiliki arti dan fungsi, tetapi data adalah fakta mentah yang tidak dapat dipahami oleh manusia sehingga perlu dianalisis untuk menghasilkan kebijakan yang tepat. Organisasi menggunakan teknologi yang tersedia untuk mengelola aktivitas mereka

DAFTAR PUSTAKA

Laudon, K., & Traver, C. (2017). *England: E-Comerse 2016 business, tecnology, sociey (12th ed.).* England:: Britis Library Cataloguint-in.

Rocheleau , B., & Wu, L. (2002). Public versus Private Information Systems. Do They Differ in Important Ways? A Review and Empirical Test, ., pp. . *American Review of Public Administration Vol. 32 No.4*, 379-397.

Barabba, V. (1975). *The Right of Privacy and the Need to Know.* US Cencus.

Sundgren, B. (2005). What Is Public Information System? *International Journal of Public Information Systems*, 81-99.

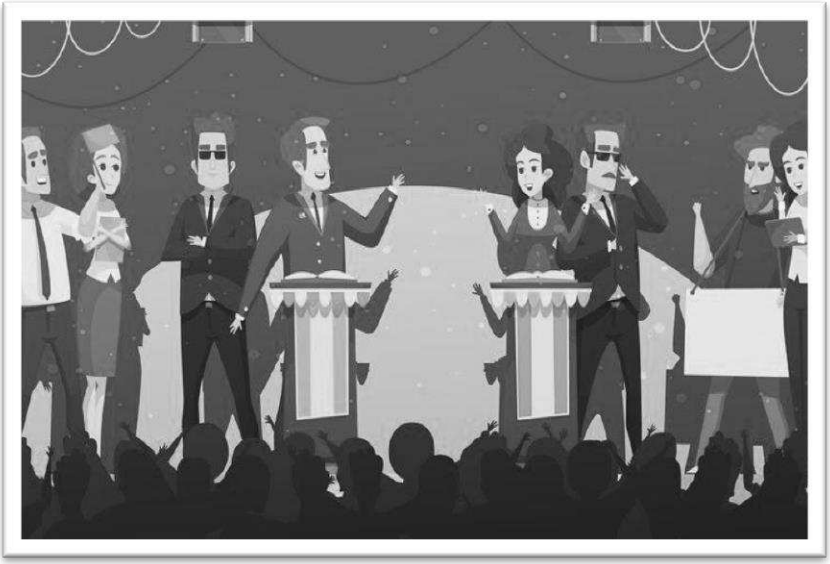

TATA KELOLA SEKTOR PUBLIK

BAB 12: MEKANISME TATA KELOLA SEKTOR PUBLIK

Putu Eka Purnamaningsih, SH., M.AP

Universitas Udayana

BAB 12

MEKANISME TATA KELOLA SEKTOR PUBLIK

A. PENDAHULUAN

Mekanisme tata kelola sektor publik erat kaitannya dengan pemerintah dalam mengurus dan mengatur sistem pemerintahannya untuk rakyat, salah satunya di Indonesia. Mekanisme yang baik dapat mewujudkan suatu good governance atau pemerintahan yang baik. Pemerintahan yang baik pula akan mendorong terbentuknya suatu pengelolaan organisasi sector public yang baik. Hal ini tentunya tidak akan dapat terwujud tanpa adanya partisipasi dari pemerintah agar melakukan berbagai reformasi di berbagai sector meliputi sector public dan reformasi birokrasi

Publik governance juga berperan dalam mengubah pola hubungan yang lebih efektif antar pemerintah dan publik dari yang semula kaku menjadi lebih fleksibel dengan mengedepankan partisipasi dan transparansi dalam tata kelola sektor publik. Disamping pengetahuan mengenai apa mekanisme tata kelola sektor publik, ada juga peran, prinsip, implementasi, implikasi yang dapat dinilai. Prinsip-prinsipnya adalah demokrasi, transparansi, akuntabilitas, rule of law, kewajaran dan kesetaraan. Penilaian itu nantinya akan menjadi sebuah evaluasi untuk pemerintah dalam memperbaiki sistem pemerintahan yang ada. Penyelenggaraan tata kelola sektor publik yang buruk akan sangat merugikan kegiatan perekonomian dan tujuan dalam mencapai kesejahteraan umum. Contoh dari hal tersebut adalah korupsi, kolusi,

DAFTAR PUSTAKA

Afandi, M., & Afandi, S. A. (2018). Implikasi Tata Kelola Sektor Publik Era Reformasi. Tunas Gemilang.

Hoesada, J. (2013, Oktober 1). *Good Public Governance*. Retrieved from Komite Standar Akuntasi Pemerintahan:https://www.ksap.org/sap/good-public governance/#:~:text=Dalam%20kata%20sambutannya%2C%20Menteri%20Pendayagunaan,tugasnya%20secara%20bertanggung%20jawab%20dan

Indonesian Corruption Watch. (2022, April 21). *Tren Penindakan Kasus Korupsi Badan Usaha Milik Negara (BUMN)*. Retrieved from ICW (Indonesian Corruption Watch): httpsWardhani Ratna. (2016). Tata Kelola Sektor Publik. Retrieved From http://feb.mercubuana.ac.id/wp-content/uploads/2016/06/Materi-Seminar-AKT-Ibu-Ratna-12-JUNI-2016-TATA-KELOLA-SEKTOR-PUBLIK.pptx diakses pada 24 September 2022://antikorupsi.org/id/tren-penindakan-kasus-korupsi-badan-usaha-milik-negara-bumn

Pietersz, J. J. (2017). Prinsip Good Governance Dalam Penyalahgunaan Wewenang. *SASI,Fakultas Hukum Universitas Pattimura*, 22.

Pollitt, C., & Bouckaert, G. (2003). 2. Evaluating public management. *Evaluation in public-sector reform: concepts and practice in international perspective*, 12.

Rossieta, H., Muktiyanto, A., & Geraldina, I. (n.d.). Tata Kelola Sektor Publik. Universitas Terbuka. Retrieved September 22, 2022

Sayidah, N. (2016). Makna Corporate Governance Di Sektor Publik. *The 9th NCFB and Doctoral Colloquium 2016*, 49-66.

Sulistiyowati, F. (2022). Pengaruh Implementasi Tata Kelola Sektor Publik Yang Baik Terhadap Kualitas Anggaran Skpd. *Kajian Bisnis Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Kempa, F., Rijal, & Irwan. (2021). Penerapan Prinsip - Prinsip Good Governance dalam Meningkatkan Kinerja Aparatur Pelayanan Publik (Studi Kasus pada Kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Jayapura). Jurnal Aktor, 55-64.*

Widya Wiwaha, *30*(2), 54–69. https://doi.org/10.32477/jkb.v30i2.357
Yahya, A. A. (2022, April 29). Efektivitas Pelayanan Publik Melalui Sistem Pengelolaan Pengaduan Aplikasi SP4N-LAPOR. *Jurnal Media Birokasi, 4*(1), 1-22

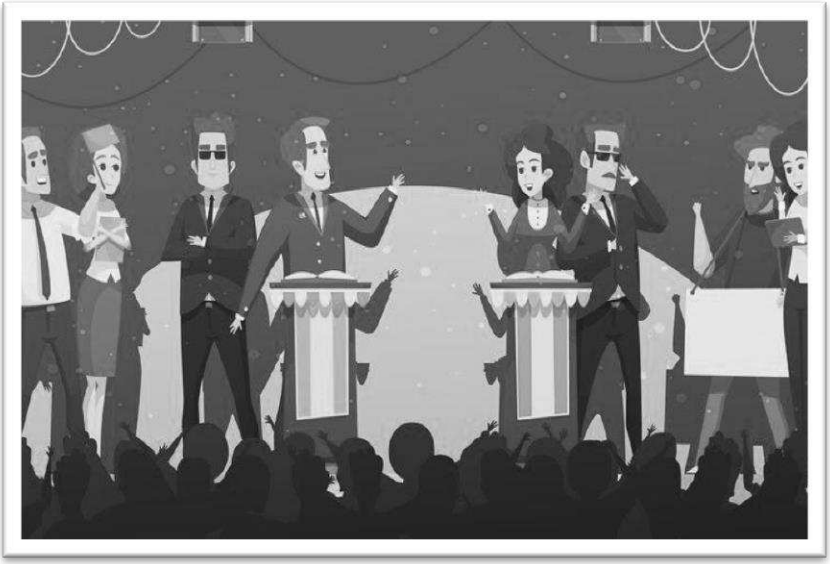

TATA KELOLA SEKTOR PUBLIK

BAB 13: MANAJEMEN TATA KELOLA SEKTOR PUBLIK

Dr. Eko Sudarmanto, S.E., M.M

Universitas Muhammadiyah Tangerang [UMT] Indonesia

BAB 13

MANAJEMEN TATA KELOLA SEKTOR PUBLIK

A. PENDAHULUAN

Manajemen selalu dibutuhkan bagi suatu organisasi baik swasta maupun publik guna mengarahkan orang-orang yang ada di dalamnya untuk bekerjasama dalam mencapai tujuan organisasi. Sedangkan ilmu manajemen digunakan untuk menggerakkan orang-orang di dalam organisasi supaya bisa beraktivitas demi kepuasan dan kepentingan semua elemen organisasi yang ada. Sehingga manajemen dibutuhkan ketika terdapat orang-orang yang bekerjasama dalam mencapai tujuan yang diinginkan bersama.

Meskipun manajemen adalah sesuatu yang abstrak, tetapi dari hasil implementasi di dalam organisasi akan terlihat dengan mudah peran manajemen tersebut. Manajemen juga merupakan suatu siklus kegiatan yang disusun secara sistematis dan terkoordinir melalui pemanfaatan sumber daya yang dimiliki, baik sumber daya manusia maupun sumber daya lainnya. Pada umumnya, di dalam manajemen sedikitnya terdapat beberapa tahapan kegiatan yang meliputi perencanaan (*planning*), pengorganisasian (*organizing*), pelaksanaan (*actuating*) dan pengendalian (*controlling*).

Ilmu Manajemen merupakan salah satu cabang dari ilmu sosial yang menggunakan kerangka ilmu pengetahuan yang sistematis, serta memiliki beberapa kaidah, prinsip, dan konsep yang dapat diterapkan pada semua

DAFTAR PUSTAKA

Atreya, Binod & Armstrong Anona. (2002). "A Review of the Criticisms and the Future of New Public Management," *Melbourne: Working Paper 7/2002.*

Harrison, L.E. & Huntington. (2000). *Culture Matters How Values Shape Human Progress*, New York: Basic Books.

Hughes, Owen E. (1994). *Publik Management and Administration; and Introduction,* New York: ST. Martin's Press Inc.

Keban, T. Yeremias. (2004). *Enam Dimensi Strategis Administrasi Publik*, Yogyakarta: Gava Media.

Macionis, J.J. (1991). *Sociology: Third Edition.* New Jersey: Prentice Hall.

Mahmudi. (2003). "New Public Management (NPM): Pendekatan Baru Manajemen Sektor Publik," *Sinergi, Vol 6 No. 1, hal 69-76.*

Mahsun, F. Sulistyowati & Heribertus A. Purwanugraha. (2012). *Akuntansi Sektor Publik.* Yogyakarta: BPFE Yogyakarta.

Mardiasmo. (2006). "Pewujudan Transparansi dan Akuntabilitas Publik MelaluiAkuntansi Sektor Publik: Suatu Sarana Good Governance," *Jurnal Akuntansi Pemerintah, Vol. 2, No. 1, hal 1 - 17*

Mc Kevitt, David & A. Lawton. (1994). *Publik Sector Management : Theory, Critique, and Practice.* Great Britain: Cromwell Press.

Setiyono, Budi. (2014). *Pemerintahan dan Manajemen Sektor Publik: Prinsip-prinsip Manajemen Pengelolaan Negara Terkini*. Yogyakarta: CAPS.

Sudarmanto, Eko dkk. (2020). *Manajemen Sektor Publik*. Medan: Yayasan Kita Menulis.

Turner, M. & Hulme D. (1997). *Governance, Administration and Development*. New York: Palgrave.

United Nations Develompment Programme (UNDP). (1996). *Human Development Report*. New York: Oxford University Press.

Website: www.oecd.org/indonesia diunduh tanggal 18 November 2022.

PROFIL PENULIS

Hesti Umiyati, S.E., M.M.

Penulis adalah Dosen Tetap di Akademi Sekretari dan Manajemen – ASM LEPISI Tangerang Program Studi Sekretari. Magister Manajemen (S2) di bidang Manajemen Pemasaran tahun 2005, Sarjana (S1) di bidang Manajemen tahun 2003. Saat ini menjabat sebagai Ketua LPPM ASM LEPISI (2019 – 2023). Pernah menjabat sebagai Direktur ASM LEPISI (2011 – 2019), Sebagai Wakil Direktur 1 Bidang Akademik (2000 – 2011). Berbagai pelatihan dan kursus yang berkaitan dengan Sekretaris dan Manajemen telah diikuti, menjadi pengawas dan penguji kompetensi SMK di Kota dan Kabupaten Provinsi Banten dari tahun 2002 s.d. sekarang. Tahun 2010 lulus mendapatkan Sertifikat Pendidik dari Kementerian Pendidikan Nasional Republik Indonesia pada bidang Studi Manajemen dan lulus sertifikasi BNSP Kompetensi Manajemen Perkantoran.

Dr. Kasful Anwar

Penulis adalah Dosen Tetap di Universitas Respati Indonesia pada tahun 2005 sampai dengan sekarang di Program Pascasarjana Magister Ilmu Administrasi dengan mengampu Mata Kuliah Ilmu Administrasi, Metode Penelitian Administrasi dan Manajemen Sumber Daya Manusia. Dosen Pascasarjana Universitas Brawijaya Malang dan beberapa PTS lainnya. Pernah menjabat sebagai Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Indonesia (STIAKIN), Departemen Pertanian, Departemen Dalam Negeri, Departemen Kelautan Perikanan dan Kementerian Pemuda Olahraga.

Ade Putra Ode Amane, S.Sos., M.Si

Penulis lahir di salati, 19 September 1985. Penulis adalah dosen tetap pada Program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Luwuk. Menyelesaikan pendidikan S1 pada Program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Luwuk dan melanjutkan S2 pada Program Studi Administrasi Negara Konsentrasi Administrasi Pemerintahan Daerah Universitas Indonesia Timur (UIT) Makassar. Penulis menekuni bidang Ilmu Sosial. Penulis saat ini menjabat sebagai Ketua Pusat Studi Kebijakan Publik dan Politik (PUSTAKA) Universitas Muhammadiyah Luwuk Periode 2022-sekarang. Bersama kawan-kawan penulis menerbitkan buku antologi puisi "Air Mata Anonim" dan "Realitas Dunia Birahi". Penulis juga berkesempatan melibatkan diri dalam berbagai penulisan *Book Chapter*.

Wesley Liano Hutasoit S.Sos., M.SP

Penulis memilih bidang sosial pada Sekolah Menengah Umum RK Bintang Timur di Pematang Siantar. Ketertarikan penulis dalam bidang sosial dimulai sejak tahun 2003 semasa duduk dibangku perkuliahan. Penulis menyelesaikan pendidikan Sarjana di Universitas HKBP Nommensen Medan tahun 2010 dan menyelesaikan Magister Studi Pendidikan di Universitas Sumatera Utara, Kota Medan tahun 2012. Penulis sebagai dosen tetap di Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Program Studi Administrasi Publik dari tahun 2015 sampai sekarang. Tanggung jawab Tri Dharma Perguruan Tinggi dan juga ketertarikan penulis dituangkan dalam penelitian juga aktif menulis dalam Bunga Rampai kumpulan tulisan sosial.

Dr (c) Khairul Rijal, S.E., M.Ag

Penulis lahir 11 Februari 1994 di Baturaja, Kabupaten Ogan Komering Ulu (OKU) dari pasangan Saili dan Nurhayati. Ia menikah dengan Ade Yolanda putri dari Alm M Nur Sofyan dan Ratnawati. Ia menamatkan pendidikan formal di SDN 26 Lawang Kidul 2006. Selanjutnya, ia menempuh pendidikan SMPN 2 Lawang Kidul 2009, dan SMAN 1 Lawang Kidul, Tanjung Enim 2012. Selepas menamatkan pendidikan SMA ia melanjutkan pendidikan perguruan tinggi (S1) di dua Universitas sekaligus yakni satu di Jurusan Ekonomi Islam di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Raden Fatah Palembang dan satu lagi di Jurusan Manajemen Fakultas Ekonomi Universitas Sriwijaya, kemudian ia juga melanjutkan studi Pascasarjana di dua tempat sekaligus yakni di International Islamic University Malaysia dengan jurusan Master of Business Administration (MBA) dan juga mengenyam Pascasarjana pada jurusan Studi Islam, UIN Raden Fatah Palembang. Saat ini sedang melanjutkan Studi Doktoral di Universitas Sriwijaya mengambil jurusan Ilmu Ekonomi. Pengalaman organisasi menjadi relawan dari beberapa lembaga yakni UPZ Kecamatan Lawang KIdul BAZNAS Muara Enim, Anggota Masyarakat Ekonomi Syariah (MES) Sumatera Selatan, Anggota Masyarakat Ekonomi Syariah (MES) Malaysia dan saat ini aktif sebagai Sekretaris Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kabupaten Muara Enim. Beberapa prestasi yang telah diraih antara lain: Juara 1 lomba Olimpiade Ekonomi Islam tingkat perguruan tinggi UIN Raden Fatah Palembang, 2015, Juara 2 lomba Futsal tingkat perguruan tinggi UIN Raden Fatah Palembang, Juara Best Group di ajang Asia Student Summit, Korea Selatan, 2017, sebagai Finalis paper ASEAN Islamic Economic Summit, Malaysia, 2017, sebagai Best Student of University UIN Raden Fatah Palembang 2017, Penerima Beasiswa BEPASIBA PTBA. Sementara itu, riwayat pekerjaan dimulai menjadi seorang pebisnis sejak awal kuliah 2012 sampai saat ini (mulai dari jualan keripik, pulsa, buku, makanan dan minuman serta percetakan) selain itu juga menjadi pegawai koperasi syariah 2015- sekarang, menjadi peneliti di Share-E Management 2018-sekarang. Ia pernah bekerja di Sekolah Tinggi Ekonomi Bisnis Islam

(STEBIS) Pagar Alam 2019. Saat ini ia sebagai Dosen di Sekolah Tinggi Ekonomi Bisnis Islam (STEBIS) Muara Enim. Juga saat ini ia menjabat sebagai Kepala Departemen Perguruan Tinggi Yayasan Generasi Rabbani Muara Enim. Kemudian saat ini juga menjadi seorang Penyuluh Agama di Kabupaten Muara Enim. Dengan kesibukan yang ada, beliau tetap senantiasa berbagi ilmu dengan mengisi kajian, penyuluhan, majelis taklim, seminar, talkshow dan acara sejenisnya. Sebagai penulis ia juga aktif dalam penelitian yang diselenggarakan lembaga lokal maupun nasional dan juga aktif menulis di berbagai media cetak dan online. Di antara karya tulis dalam bentuk proceeding; Penulis paper *Crowdfunding as waqf financial intermediation to develop the rule of sosial capital*, Padang, (2019) Penulis paper *Financial Performance Measurement Model Modification Using Tools of Ritchi Kolodinsky and International Standard Zakat of Management* (ISZM), PUZKASBASNAS, Bandung(2019); Penulis paper Potensi Pembayaran Zakat Secara Online dan Manual serta Realisasi Dana Zakat Indonesia, Palembang (2019); Penulis paper *Analysis of Online Portal Use and E-Payment Application*: Case Study BAZNAS Indonesia (ICONZ) PUSKASBAZNAS, Yogyakarta (2018); Penulis paper Impact *of Zakat on Allevation of Proverty and International Improved Welfare of Mustahik (Case : BAZNAS South Sumatra Province)* Bengkulu, (2018); Penulis paper *Integration of Capital Market Based on Mutual Product* (IIUM), Malaysia, (2017); Penulis paper *Integration of sociopreneur for Indonesian Development*, Seoul, South Korea, 2017; Penulis paper Pemikiran Yusuf Qardhawi "zakat sebagai solusi kemiskinan", Palembang, 2017; Penulis Buku: Ekonomi Islam (2020), Pengantar Perbankan Syariah (2020), *Collective Leadership* (2020), Pengantar Bisnis (2020), Perilaku Organisasi (2020), Kebijakan Publik(2020) dan 30 Problem zakat, (2016).

Dr. Nur Rohim Yunus, SH., LLM

Penulis Ph.D. in Constitutional Law at GUU *(Gosudarstvennyy Universitet Upravleniya)* Moscow Russia dan Master of Law (LL.M) dari International Islamic University (IIU) Islamabad Pakistan. Dia adalah santri alumni Pondok Modern Darussalam Gontor (1999) & ISID (2002). Selain aktifitasnya sebagai Dosen Tetap Ilmu Hukum Tata Negara UIN Syarif Hidayatullah Jakarta juga aktif di dunia publikasi dan penelitian. Buku perdananya berjudul "Manajemen Waktu (2006)" ditulis bersama gurunya H. Hendri Tanjung, PhD, versi Inggris pun telah dipublikasi di beberapa negara, Singapura, Pakistan dan Turki. Buku-buku buah karyanya antara lain: Pokok-Pokok Ilmu Negara (2012), Filsafat Ilmu Pengetahuan (2012), Filsafat Manusia (2013), Restorasi Budaya Hukum (2013), Pemikiran Politik Hukum Negara (2020), Cita Hukum Politik Negara (2021), Extra-Ordinary Crime (2022). Penulis selalu berusaha memanfaatkan waktu untuk menggoreskan mata pena sehingga diharapkan dapat ambil bagian dalam dakwah bil qolam. "Taharrak fainna fil harakati barakatun, Bergeraklah, karena dalam gerakan itu ada keberkahan."

Dr. Ardhana Januar Mahardhani, M.KP.

Penulis lahir di Tulungagung pada tanggal 23 Januari 1987. Merupakan dosen tetap di Universitas Muhammadiyah Ponorogo pada Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn). Menempuh pendidikan formal S1 Administrasi Publik Universitas Brawijaya Malang, S2 Magister Kebijakan Publik Universitas Airlangga Surabaya, dan S3 Administrasi Publik di Universitas Diponegoro Semarang. Penulis juga merupakan sekretaris Asosiasi Profesi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (AP3KnI) Provinsi Jawa Timur. Saran dan kritik membangun sangat penulis harapkan dalam proses kesempurnaan

tulisan dari penulis. Pembaca dapat menghubungi penulis melalui email: *ardhana@umpo.ac.id*

Christina Bagenda, S.H.,M.H., C.P.C.L.E

Penulis adalah dosen tetap di Prodi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Flores Ende dari tahun 2003 sampai dengan sekarang. Ibu dari dua orang Putra dan Putri yang lahir di kota kembang Bandung, Sekarang menjabat sebagai Ketua Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Flores 2020-2024. Pengajar Mata kuliah Hukum Perdata, Hukum Dagang, Hak Milik Intelektual, Hukum Perikatan, Hukum Acara Perdata dan Latihan Praktek Perdata. Selain mengajar penulis juga aktif dalam menulis Book Chapter di berbagai Penerbit dan juga menulis di Jurnal Terakreditasi sinta 2, 3 dan 4. Melakukan Penelitian (Penelitain kerjasama Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kab Ende) di akhir tahun 2021 yaitu mengenai "Laporan Survei Indek Kepuasan Masyarakat (IKM) Terhadap Pelayanan Publik Kantor Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu pada 6 Kecamatan" serta penelitian awal Tahun 2022 yaitu: "Persepsi Mahsiswa Terhadap desain Implementasi Merdeka Belajar Kampus Merdeka: Survei pada Program Studi Ilmu Hukum Universitas Flores (Dipublikasikan Di Jurnal Ilmu Pendidikan Vol 4 No. 1 Tahun 2022), mengikuti bebagai pelatihan: Pelatihan Ahli Hukum Kontrak, Pelatihan Motivator, Pelatihan Publik Speaking dan Pelatihan Hypno teraphys ; serta mengikuti pertemuan akbar APPTHI se Indonesia di Semarang 10-12 Juni 2022. Email Penulis: bagendatitin@gmail.com

Dr. Yetty Setiyaningsih SP, M.Eng, IALI

Saat ini penulis adalah ASN dan menjabat sebagai Kepala Bidang Pengelolaan Pertamanan dan Pemakaman Pemerintah Kota Magelang, dan aktif sebagai Ketua Ikatan Arsitek Lanskap Indonesia (IALI) Provinsi Jawa Tengah. Arsitek Lanskap Ahli Madya sejak 2019 ini juga merupakan Peneliti, Penulis dan Dosen Luar Biasa di beberapa universitas (Universitas Negeri Semarang, Universitas Negeri Jember) serta dosen tamu di Magister Kebijakan Publik Universitas Gadjah Mada. Menamatkan S1 di program studi Arsitektur Lanskap, IPB 2002, kemudian S2 di Perencanaan Kota dan Daerah Universitas Gadjah Mada dan S3 di Manajemen Kebijakan Publik Universitas Gadjah Mada di tahun 2022 dengan predikat cum laude. Topik ekspertisnya adalah lanskap, perencanaan kota dan daerah, kebijakan publik, kebijakan anggaran dan dapat ditemukan publikasinya dalam jurnal.

Putu Eka Purnamaningsih, S.H., M.AP

Penulis lahir di Denpasar tanggal 14 September 1981. Penulis merupakan salah satu dosen tetap pada Program Studi Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Udayana. Penulis menempuh dan menyelesaikan pendidikan S1 pada Ilmu Hukum di Fakultas Hukum Universitas Udayana pada tahun 2000 hingga 2004. Setelah berhasil lulus pada tahun 2004, penulis kembali menempuh pendidikan S2 pada Jurusan Magister Ilmu Administrasi Publik Fakultas Pascasarjana Universitas Pendidikan Nasional pada tahun 2011 hingga 2012. Penulis memiliki kepakaran terhadap ilmu administrasi publik, untuk mengembangkan kepakaran tersebut penulis pun aktif sebagai peneliti di ilmu kepakaran yang digeluti. Beberapa penelitian yang telah penulis lakukan secara berturut turut yakni Penelitian Hibah Unggulan Program Studi Pendanaan Universitas Udayana. Serta penulis juga aktif dalam

Penelitian Dosen Muda yang diadakan oleh Universitas Udayana. Penulis juga berkontribusi aktif dalam penulisan di berbagai jurnal ilmiah. Penulis berharap buku ini dapat memberikan manfaat bagi para civitas akademika dan juga masyarakat umum.

Dr. Eko Sudarmanto, S.E., M.M

Penulis Lahir di Boyolali, 12 Maret 1970, anak kedua dari pasangan Dulkarim (alm.) dan Sunarti (alm.). Pendidikan: Program Doktoral Institut Perguruan Tinggi Ilmu Al-Quran (PTIQ) Jakarta, Program Studi Ilmu Al-Quran dan Tafsir. Pendidikan sebelumnya, Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Tangerang (UMT) Program Studi Magister Manajemen, Sarjana Akuntansi di Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) Muhammadiyah Jakarta, Akademi Akuntansi Muhammadiyah (AAM) Jakarta, SMA Negeri Simo Boyolali, SMP Muhammadiyah 6 Klego Boyolali, dan Madrasah Ibtidaiyah Islamiyah (MII) Jaten Klego Boyolali. Pelatihan dan sertifikasi profesi yang pernah diikuti, yaitu *Certified Risk Associate (CRA), Certified Risk Professional (CRP), Certified of Sharia Fintech (CSF), Certified Holistic Management in Quran (CHMQ)* dan *Certified Fundamental Tax (C.FTax).* Karya ilmiah Disertasinya (tahun 2022) meraih rekor MURI sebagai Disertasi Ilmiah Dengan Referensi Terbanyak. Penulis adalah Dosen tetap Fakultas Ekonomi dan Bisnis - Universitas Muhammadiyah Tangerang [UMT] Indonesia. Sebelumnya sebagai praktisi di salah satu bank swasta terbesar di Indonesia cabang Jakarta, dan di PT JIPRI Rattan Industry – Tangerang. Email: ekosudarmanto.umt@gmail.com.

Kadek Wiwin Dwi Wismayanti, S.E., MAP

Penulis lahir di Karangasem tanggal 16 Juli 1987. Penulis adalah dosen tetap pada Program Studi Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Udayana. Menyelesaikan pendidikan S1 Pada Ilmu Ekonomi di Fakultas Ilmu Ekonomi dan Bisnis Universitas Udayana pada tahun 2005 hingga 2009 kemudian melanjutkan S2 pada Jurusan Magister Ilmu Administrasi Publik Fakultas Pascasarjana Universitas Pendidikan Nasional pada tahun 2009 hingga 2011. Penulis menekuni bidang penelitian dimana secara berturut turut dalam Penelitian Hibah Unggulan Program Studi Pendanaan Universitas Udayana Penulis juga berkontribusi aktif dalam penulisan di berbagai jurnal ilmiah. Penulis berharap buku ini dapat memberikan manfaat bagi para civitas akademika dan juga masyarakat umum. Beberapa penelitian yang telah penulis lakukan secara berturut turut yakni Penelitian Hibah Unggulan Pogram Studi Pendanaan Universitas Udayana. Serta penulis juga aktif dalam Penelitian Dosen Muda yang diadakan oleh Universitas Udayanan. Penulis juga berkontribusi aktif dalam penulisan di berbagai jurnal ilmiah. Penulis berharap buku ini dapat memberikan manfaat bagi para civitas akademika dan juga masyarakat umum. Email Penulis: wiwin.fisip@unud.ac.id

Baren Sipayung, S.H., M.A.P., C.L.A., CRMP

Penulis bernama lengkap Yusuf Baren Sipayung lahir di Jakarta, 17 Februari 1985. Penulis menyelesaikan pendidikan dasar di SD Strada Vanlith II Jakarta pada tahun 1997, lulus SLTP Strada Santa Anna Jakarta pada tahun 2000, dan lulus SMU Negeri 12 Jakarta pada tahun 2003. Penulis kemudian melanjutkan pendidikan S-1 Ilmu Hukum di Universitas Gadjah Mada lulus tahun 2008 berpredikat *Cumlaude* dan S-2 Magister Administrasi Publik pada Universitas Terbuka lulus tahun 2022 berpredikat *Dengan Pujian* sebagai salah satu penyandang IPK tertinggi

yaitu 3,89. Penulis juga telah lulus sertifikasi Ahli Pengadaan Nasional dari LKPP pada Tahun 2012, *Certified Legal Auditor* (C.L.A.) pada tahun 2018 dan *Certified Risk Management Professional* (CRMP) pada tahun 2022. Saat ini, penulis sedang menempuh program Magister Hukum pada Universitas Mulawarman. Sejak lulus S-1 tahun 2008 hingga awal tahun 2011, penulis telah memiliki sejumlah pengalaman bekerja mulai dari Asisten Advokat di IQBAL & REKAN *Law Office*, Legal Staff di PT. Dwikarya Langgeng Sukses, KYC Staff di DEUTSCHE BANK AG Jakarta Branch, dan Legal Officer di PT. Commerce Finance. Selanjutnya sejak Mei 2011 hingga sekarang bekerja sebagai abdi negara pada Badan Pemeriksa Keuangan dan meraih penghargaan Satya Lancana Karya Satya X Tahun berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 92/TK/TAHUN 2021 tanggal 13 September 2021. Penulis juga telah mengikuti berbagai pendidikan dan pelatihan (diklat), *workshop*, *focus group discussion* (FGD), seminar, sosialisasi, dan *knowledge transfer forum* (KTF) di bidang pemeriksaan dan pembangunan zona integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan/atau Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM). Semenjak tahun 2013, penulis berpengalaman dalam pemeriksaan atas keuangan, kinerja, penghitungan kerugian negara, dan pertanggungjawaban bantuan keuangan partai politik, serta pemantauan penyelesaian kerugian daerah pada beberapa entitas diantaranya Kementerian PAN.RB, DPR, ANRI, Kemendikbud, Pemkab Berau, Pemkab Kutim, Pemprov Kaltim, Desa Tanjung Aru, Pemkot Balikpapan, Pemkab Kukar, dan PPU. Penulis sejak 2017 sampai dengan saat ini masih aktif menulis karya ilmiah yang dipublikasikan dalam berbagai *website* dan jurnal akademik. Selain itu, penulis juga telah berhasil menyelesaikan karya tulis buku “Faktor-Faktor yang Memengaruhi Kinerja dan Kualitas Kehidupan Kerja Auditor: Teori dan Studi Kasus” yang pertama dipublikasikan, “Perlindungan Hukum terhadap HKI”, “Tindak Pidana dalam KUHP”, “Manajemen Sumber Daya Manusia: Teori dan Implementasi”, “Hukum Perdata”, “Manajemen Risiko Usaha Mikro”, dan sejumlah buku yang berkolaborasi dengan penulis lainnya yang masih dalam proses penerbitan di kemudian hari. Email: baren.sipayung@bpk.go.id

TATA KELOLA
SEKTOR PUBLIK

Tata kelola sektor publik adalah seperangkat ketentuan, baik yang bersifat formal maupun informal, yang menentukan proses pengambilan keputusan dan tindakan yang berhubungan dengan kebutuhan publik, dengan tujuan untuk memelihara nilai-nilai konstitusional sebuah negara dalam menghadapi berbagai perubahan dalam permasalahan serta lingkungan sosial ekonomi global. Tata kelola sektor publik berhubungan langsung dengan aktivitas investasi serta perkembangan ekonomi suatu negara. Saat ini, tantangan terbesar dari tata kelola sektor publik adalah memelihara keseimbangan antara pemeliharaan nilai-nilai konstitusional suatu negara di satu pihak dan tuntutan untuk beradaptasi dengan perubahan sosial yang terjadi dalam ekonomi global. Dalam hal ini, negara diharapkan untuk menggunakan pendekatan yang lebih fleksibel dalam merancang dan menerapkan tata kelola sektor publik. Dengan pendekatan yang fleksibel, nilai-nilai konstitusional suatu negara dapat tetap terpelihara, tetapi juga dapat beradaptasi dengan perubahan sosial ekonomi di tingkat global. Tata kelola sektor publik yang baik membantu membangun kepercayaan serta memberikan kepastian dan stabilitas yang dibutuhkan untuk perencanaan investasi jangka menengah dan jangka panjang. Tata kelola sektor publik mengubah model interaksi yang produktif antara pemerintah dan publik yang awalnya bersifat kaku menjadi lebih fleksibel dengan mengedepankan partisipasi dan transparansi pengelolaan sektor publik.

Penerbit widina
www.penerbitwidina.com

ISBN 978-623-459-353-2
9 786234 593532